

DATA BASE

DATA DAN FAKTA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015

Tim Penyusun :

Ir. Iskandar D, M.Ec.Dev
Khaeruddin, SE. M.Si
Drs. Bakri
Aminuddin, ST.MT
Helmi Al Atas, ST
Hendra Irawan, ST
Nelly Fadlia, SP
Agus Subandi, S. AP
Abdul Gafur, S. AP
Amrullah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa
Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar, Telp. 0371-21582 Fax. 0371-
23657
email : sosbud.bappedasbw@yahoo.com

Daftar Isi

Lembar Sampul

Tim Penyusun	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan	v

Bab 1 Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa

1

2.1. Geografi	1
2.2. Topografi	3
2.3. Demografi	3
2.3. Penduduk Miskin	5

Bab 2 Data dan Analisis

Pembangunan Bidang Sosial Budaya	7
2.1. Pendidikan	7
2.2. Kesehatan	14
2.3. Arsip dan Perpustakaan	20
a. Arsip	20
b. Perpustakaan	21
2.4. Kependudukan dan Catatan Sipil	22
2.5. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	31
2.6. Sosial	35

2.7. Tenaga Kerja	40
2.8. Transmigrasi	43
2.9. Kebudayaan	44
2.10. Pemuda dan Olah Raga	47
2.11. Pariwisata	49
2.12. Kesatuan Bangsa dan Politik	
Dalam Negeri dan Sat.Pol-PP	51
a. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	51
b. Sat. Pol - PP	52
2.13. Penanggulangan Bencana Daerah	53
2.14. Pemerintahan Umum	55
2.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58
Bab 3 Penutup	61

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulisan buku "*Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2015*" dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang kondisi pembangunan Bidang Sosial Budaya dan berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Perencanaan yang baik akan lebih memberikan peluang untuk terlaksananya sebuah pembangunan dengan hasil yang baik pula. Bahan baku utama sebuah perencanaan adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat, muhtahir dan komprehensif, oleh karenanya penyajian data dan informasi yang baik menjadi penentu kualitas perencanaan.

Data yang disajikan dalam buku "*Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2015*" ini bersumber dari badan / Dinas / Instansi di Kabupaten Sumbawa, dengan maksud menjadi bahan masukan dan acuan untuk melakukan perencanaan yang lebih baik pada tahun yang akan datang, pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan dan mengevaluasi hasil pembangunan secara berkesinambungan. Data dan fakta serta analisis yang tersaji merupakan gambaran keadaan pada tahun 2015.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku "*Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2015*" masih memiliki kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan agar buku ini akan lebih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 2016
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA,

Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev
NIP. 19620515 200003 1 002

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, karena data dan informasi memegang peran yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa *buku data base*, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa dari kondisi sosial budaya yang diantaranya adalah berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, keluarga berencana dan kondisi pemerintahan yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa .

Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa 2016-2021



H. M. HUSNI DJIBRIL, B. Sc.
BUPATI SUMBAWA
PERIODE 2016 - 2021

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH
WAKIL BUPATI SUMBAWA
PERIODE 2016 - 2021

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa berpedoman pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2021 dengan visi yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. ***Berdaya Saing***

Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

2. ***Mandiri***

Artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

3. ***Berkepribadian***

Artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (*parenti*) *Tau Samawa* yakni *takit ke nene kangila boat lenge*. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman

Sebagai pencerminan dari upaya menjalankan fungsi dan peran daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa, dijabarkan kedalam tujuh misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, sosial dasar bagi masyarakat serta

mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.

Misi 2 Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dimanakai sebagai misi yang di emban untuk mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Misi ini menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

Inti dari misi ini adalah berlangsungnya pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* dan *clean government* diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

Misi 3 *Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.*

Dimaknai sebagai misi yang diemban sebagai upaya meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar dan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memacu peningkatan perekonomian daerah dan mengurangi disparitas pembangunan antar kecamatan/desa/kelurahan serta mengoptimalkan penataan ruang pembangunan wilayah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Misi ini dihayatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik. Sangat diyakini bahwa upaya pemenuhan pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai di segala bidang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan semua harapan besar tersebut, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Misi 4 *Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.*

Dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Semangat dari misi ini adalah mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri

sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misi ini juga dihayatkan untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, industri pengolahan, dan pelayanan masyarakat; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; serta mewujudkan daerah yang maju dalam berinvestasi.

Misi 5 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi ini mengemban amanat untuk melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Misi 6 Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.

Dimaknai sebagai misi yang diemban dalam menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Sumbawa, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Misi 7 Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Misi ini mengemban amanat untuk menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Kondisi masyarakat Kabupaten Sumbawa yang memiliki nilai-nilai budaya yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

BAB 1

Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa

Geografis

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu wilayah kabupaten dari sepuluh kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Secara geografis Kabupaten Sumbawa terletak diantara $116^{\circ} 42' - 118^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 8' - 9^{\circ} 7'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Laut Flores**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kabupaten Dompu**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Samudera Indonesia**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Sumbawa Barat**;

Secara rata – rata jarak jangkauan Ibu Kota Kecamatan terhadap ibu Kota Kabupaten Sumbawa adalah 45,00 Km, dengan jarak Kota Kecamatan terjauh dari Ibu Kota Kabupaten adalah 103,00 Km yaitu Kecamatan Tarano. Sedangkan jarak jangkauan ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan secara rata – rata adalah 10,16 Km dengan sebaran bahwa rata – rata jarak terjauh dari ibu kota desa terhadap ibu kota kecamatan adalah 58,11 Km.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah 11.556,44 km², terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategis pada jalur lalu lintas perdagangan dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata dan Ketahanan Pangan Nasional.

Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian pada sebagai dibawah ini :

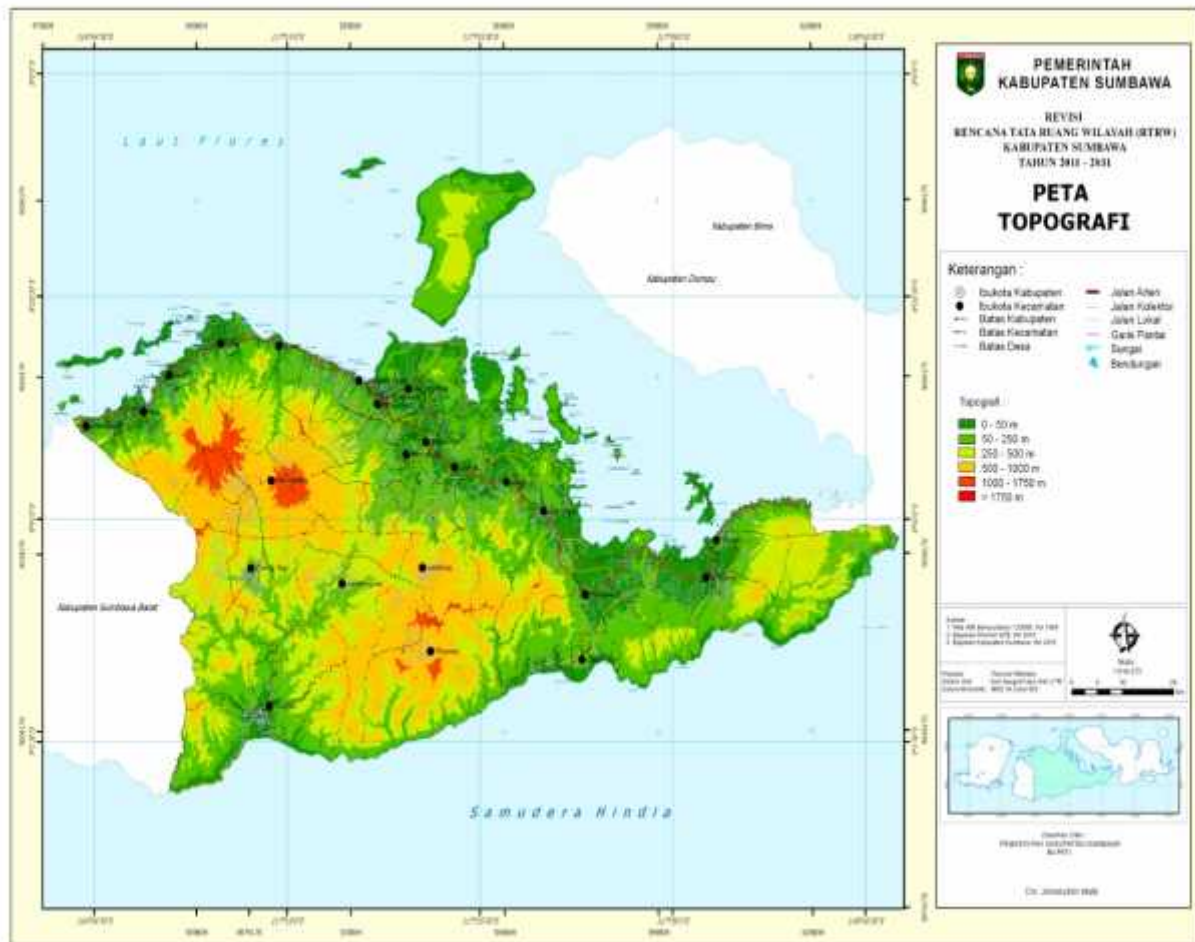
Tabel 1.1.
Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Desa / Kelurahan	Persentase Daratan
1.	Lunyuk	513,74	7	7,73
2.	Orong Telu	465,97	4	7,01
3.	Alas	123,04	8	2,64
4.	Alas Barat	168,88	8	1,16
5.	Buer	137,01	6	2,66
6.	Utan	155,42	9	2,8
7.	Rhee	230,82	4	3,01
8.	Batulanteh	391,4	6	5,89
9.	Sumbawa	44,83	8	0,66
10.	Labuhan Badas	435,89	7	6,69
11.	Unter Iwes	82,38	8	1,13
12.	Moyohilir	186,79	10	2,81
13.	Moyo Utara	90,8	6	1,37
14.	Moyohulu	311,96	12	4,7
15.	Ropang	444,48	5	6,69
16.	Lenangguar	504,32	4	7,59
17.	Lantung	167,45	4	2,52
18.	Lape	204,43	4	3,07
19.	Lopok	155,59	7	2,34
20.	Plampang	418,69	11	7,11
21.	Labangka	243,08	5	2,52
22.	Maronge	274,75	4	4,46
23.	Empang	558,55	10	8,41
24.	Tarano	333,71	8	5,02
Jumlah		6.643,98	165	100

Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa

Topografi

Topografi Kabupaten Sumbawa didominasi perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 m diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian 0-100 m dpl mencapai luas 26,51%; 100-500 m dpl seluas 42,31%; 500-1.000 m dpl seluas 27,69% dan > 1.000 m dpl seluas 3,49%, sementara untuk ketinggian kota-kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 m dpl. Ibu Kota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan Ibu Kota Kecamatan yang terendah.



Gambar 1.2. Peta Topografi Kabupaten Sumbawa

Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 sebesar 441.102 jiwa, terdiri dari laki-laki 224.974 jiwa (51%) dan perempuan 216.128 jiwa (49%), dengan sex ratio sebesar 104. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.**Jumlah, Sex Rasio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepadatan (Jiwa / Km ²)
			Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Lunyuk	513,74	10.275	9.686	19.961	106	39
2.	Orong Telu	465,97	2.485	2.264	4.749	110	10
3.	Alas	123,04	14.678	14.368	29.046	102	236
4.	Alas Barat	168,88	9.875	9.520	19.395	104	115
5.	Buer	137,01	7.032	7.017	14.049	100	103
6.	Utan	155,42	15.080	14.786	29.866	102	192
7.	Rhee	230,82	3.752	3.459	7.211	109	31
8.	Batulanteh	391,4	5.411	4.959	10.370	109	26
9.	Sumbawa	44,83	30.484	29.705	60.189	103	1343
10.	Lab. Badas	435,89	16.406	16.205	32.611	101	75
11.	Unter Iwes	82,38	9.929	9.392	19.321	106	235
12.	Moyohilir	186,79	11.940	11.592	23.532	103	126
13.	Moyo Utara	90,8	4.872	4.711	9.583	103	106
14.	Moyohulu	311,96	10.619	10.010	20.629	106	66
15.	Ropang	444,48	2.701	2.422	5.123	111	12
16.	Lenangguar	504,32	3.374	3.058	6.432	110	13
17.	Lantung	167,45	1.448	1.400	2.848	103	17
18.	Lape	204,43	8.779	8.319	17.098	105	84
19.	Lopok	155,59	9.373	9.199	18.572	102	119
20.	Plampang	418,69	15.826	15.061	30.887	105	74
21.	Labangka	243,08	5.522	5.180	10.702	107	44
22.	Maronge	274,75	5.313	4.920	10.233	108	37
23.	Empang	558,55	11.531	10.911	22.442	106	40
24.	Tarano	333,71	8.269	7.984	16.253	103	49
Jumlah		6.643,98	224.974	216.128	441.102	104	66
Th. 2014		6.643,98	222.728	213.871	436.599	104	66
Th. 2013		6.643,98	220.206	211.718	431.924	104	65
Th. 2012		6.643,98	217.679	209.440	427.119	104	64

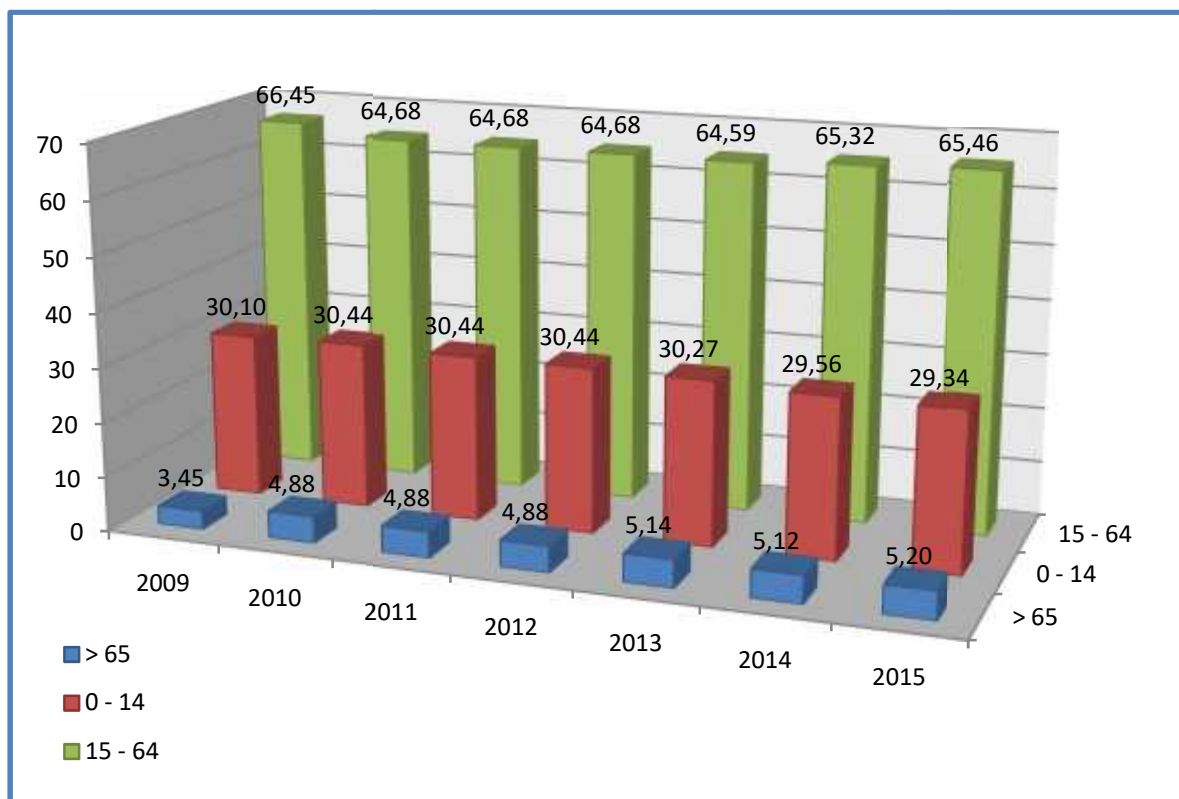
Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan terpadat dibandingkan 23 kecamatan lainnya dengan kepadatan penduduk sebesar 1.343 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Orong Telu dengan kepadatan 10 jiwa/km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan adalah 66 jiwa/km². Hal ini menggambarkan Kabupaten Sumbawa termasuk sebagai kabupaten dengan tingkat kepadatan yang rendah. Adapun struktur penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok umur, menggambarkan pada kelompok usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa, dengan proporsi sebagai berikut.

- a. Proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) sebesar 29,34%
- b. Proporsi penduduk muda/produktif (15-64 tahun) sebesar 65,46%
- c. Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 5,20%

Gambaran struktur penduduk Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada gambar 1.3.

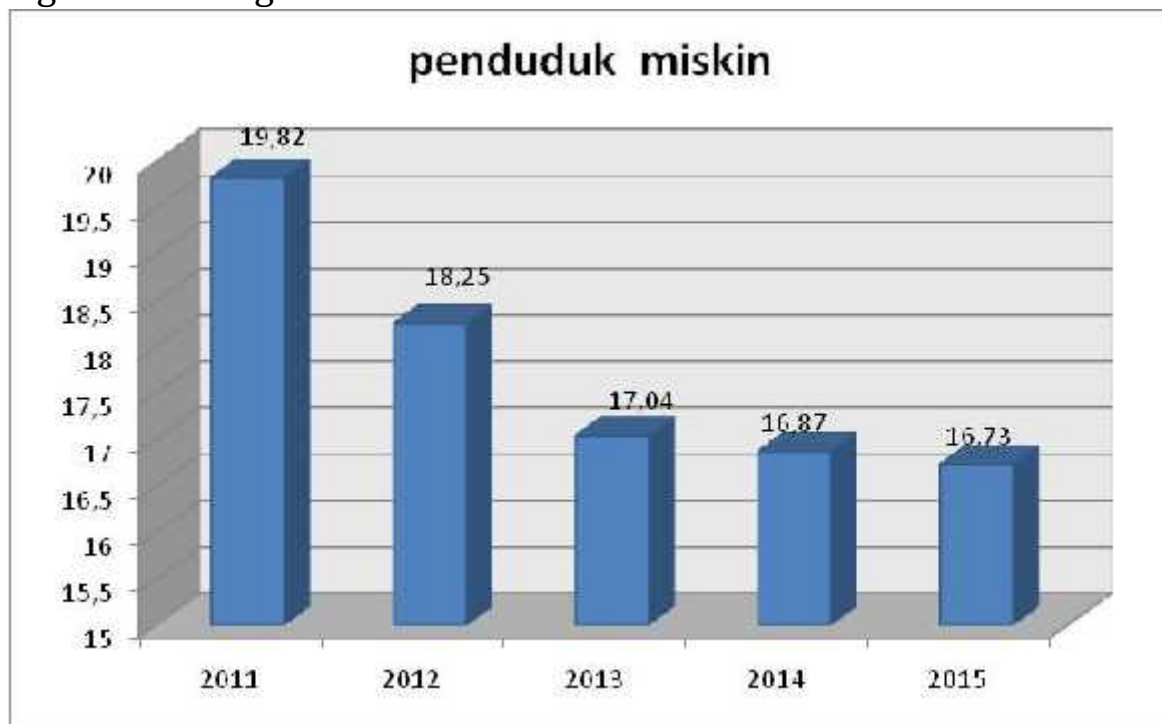


Gambar 1.3. Persentase Komposisi Penduduk Kab. Sumbawa Tahun 2000-2015

Penduduk miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa menunjukkan tren menurun, yakni dari 83.416 Jiwa (19,82%) pada tahun 2011 menjadi 73.858 jiwa (16,87%) pada tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinannya, hal ini ditandai dengan peningkatan daya beli

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana tergambar sebagai berikut



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa

Gambar 1.4. Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2015

BAB 2

Data dan Analisis

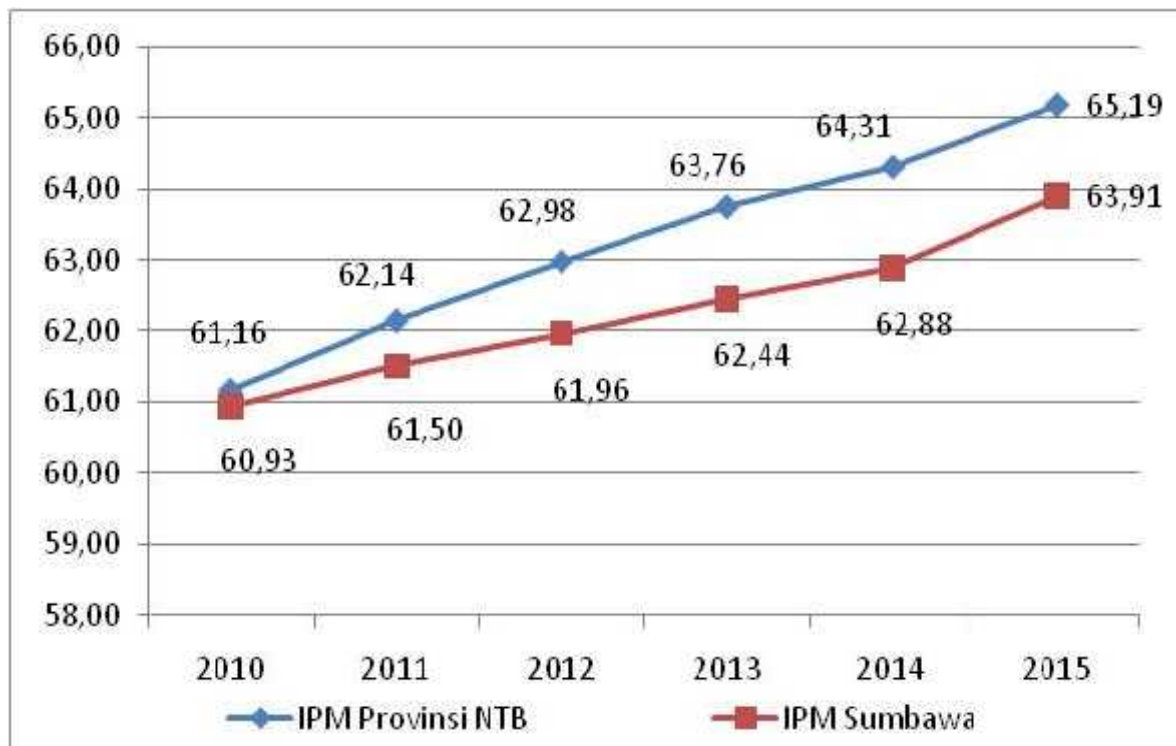
Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan di bidang sosial dan budaya. Secara garis besar arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah sebagai berikut.

2.1. Pendidikan

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara. Pendidikan adalah sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, dan sarana untuk mengantarkan Indonesia mencapai kemakmuran. Karena hal tersebut, bidang pendidikan dijadikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional dan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pendidikan bermutu dalam pembangunan suatu bangsa dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan pembangunan suatu bangsa tidak dapat terwujud dengan baik.

Kualitas pembangunan yang diukur dengan perspektif kualitas penduduk digambarkan dengan indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan agregat dari indikator pendidikan, kesehatan dan paritas daya beli. Trend perkembangan capaiannya ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumbawa

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumbawa berada pada peringkat ke 6 (enam) dari 10 Kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat.

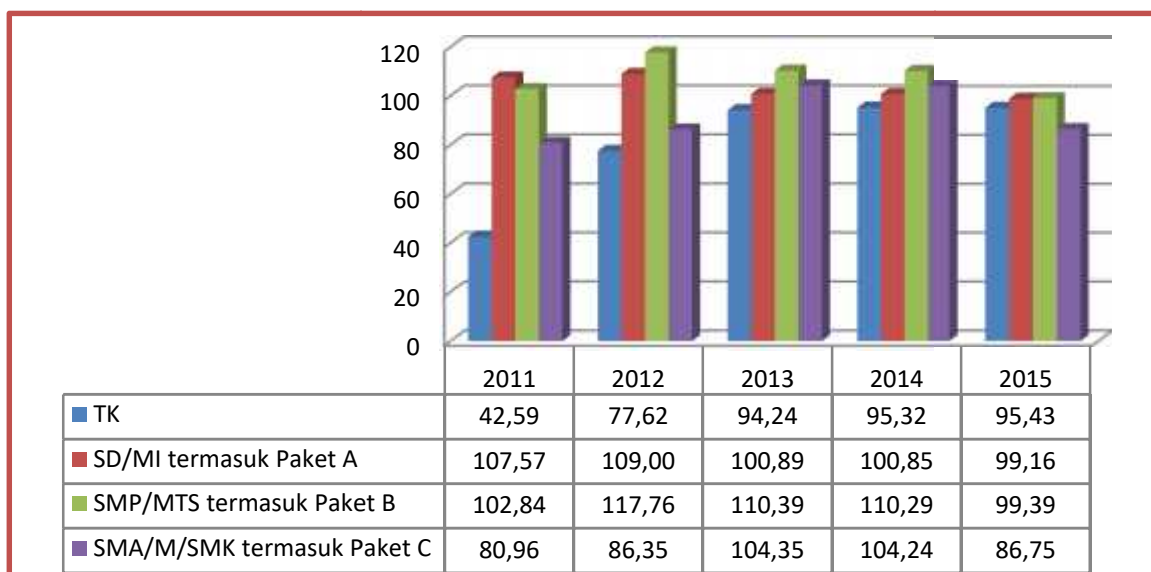
Partisipasi Sekolah

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan fisik sekolah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan memperhatikan indikator-indikator seperti rasio siswa per ruangan, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, rasio guru per siswa. Indikator ini menjadi ukuran daya tampung dan efektivitas proses belajar-mengajar.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia anak-anak, maka beban kuantitas penduduk dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa tergolong tidak kecil. Walaupun demikian pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun relatif berjalan baik. Selain kuantitas, kualitas pendidikan juga menjadi hal yang tak kalah penting dan mendesak.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 2.2. Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2015

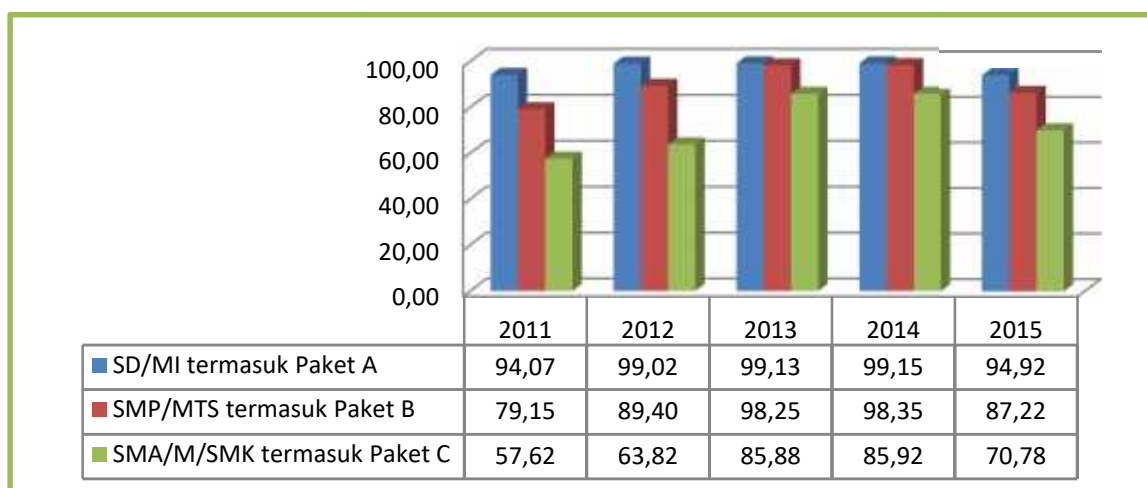
Kondisi diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan program PAUD di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka secara lebih baik sebelum masuk ke jenjang SD/MI.

APK pada jenjang SD/MI dalam periode 2011-2015 mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 2,22%, yakni dari 108,71% pada tahun 2011 menjadi 99,16% pada tahun 2015. Penurunan ini, tidak berarti penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tersebut

capaiannya rendah, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi internal, dimana idealnya APK sama dengan APM mengarah pada angka 100%. Untuk jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,13%, yakni dari 100,87% pada tahun 2011 menjadi 99,39% pada tahun 2015. Demikian pula dengan jenjang SMA/MA/SMK meningkat dari 68,87% pada tahun 2011 menjadi 86,75% pada tahun 2015 dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,38%. Peningkatan pertumbuhan APK pada jenjang pendidikan TK/RA dan SMA/MA/SMK, serta pelambatan pertumbuhan APK SD/MI menunjukkan trend yang benar pada upaya mewujudkan pemerataan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi. Secara umum perkembangan APM pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 2.3. Perkembangan APM TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2015

Grafik diatas menunjukkan bahwa Capaian APM pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan jumlah anak yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A dibawah usia 7-12 tahun, sehingga ini berdampak terhadap pencapaian APM pada jenjang pendidikan selanjutnya, pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2015 sebesar 94,92% dari 99,15% pada tahun 2014 atau menurun sebesar 4,27%, akan tetapi dalam rentang tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 0,01%, jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2015 sebesar 87,22% dari 98,35% pada tahun 2014 atau menurun sebesar 11,32%, akan tetapi dalam rentang tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 3,55%, jenjang SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2015 sebesar 70,78% dari 85,92% pada tahun 2014 atau menurun sebesar 17,62%, akan tetapi dalam rentang tahun 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 11,80%.

Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Masih adanya kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas seperti di Kecamatan Lantung, hal ini disebabkan karena masih minimnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut, sehingga untuk saat ini masih belum menjadi prioritas dalam pembangunannya. sedangkan keberadaan SD/MI, dan SMP/MTs sudah tersedia merata sesuai kebutuhan di seluruh kecamatan. Aksesibilitas sarana pendidikan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk (siswa) sasaran dan luas wilayah kerja (layanan). Sebaran penduduk yang tidak merata dan wilayah layanan yang terlalu luas dapat menurunkan tingkat aksesibilitas sarana pendidikan. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat menurunkan derajat pendidikan penduduk. Dari sisi ketersediaan fasilitas pada tahun 2014 tercatat jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan TK adalah 230 sekolah, jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah 398 sekolah, SMP/ sederajat 131 sekolah, SMA/SMK/ sederajat 56 sekolah. Adapun sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1. Sebaran Lembaga Pendidikan di Kab. Sumbawa Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
1	Lunyuk	7	14	20	7	3
2	Orong Telu	4	0	11	3	1
3	Alas	8	13	19	10	4
4	Alas Barat	8	9	17	4	2
5	Buer	6	6	12	2	1
6	Utan	9	7	24	7	4
7	Rhee	4	4	7	2	1
8	Batulanteh	6	8	21	6	2
9	Sumbawa	8	24	26	8	12
10	Labuhan	7	11	24	9	4
11	Unter Iwes	8	6	21	6	3
12	Moyo Hilir	10	24	26	7	2
13	Moyo Utara	6	6	12	3	1
14	Moyo Hulu	12	18	24	8	3
15	Ropang	5	4	7	3	1
16	Lenangguar	4	4	10	4	1
17	Lantung	4	2	3	1	0
18	Lape	4	13	15	5	1
19	Lopok	7	15	18	4	1
20	Plampang	11	14	27	12	4
21	Labangka	5	2	7	4	1
22	Maronge	4	7	6	4	1
23	Empang	10	13	21	6	3
24	Tarano	8	5	18	5	1
Jumlah		165	229	396	130	57

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa anak usia sekolah belum semua dapat masuk sekolah, padahal IPM diukur dari aspek lamanya rata-rata penduduk sekolah, belum lagi mereka yang sudah menikmati sekolah belum semuanya mampu menamatkan sekolahnya sampai

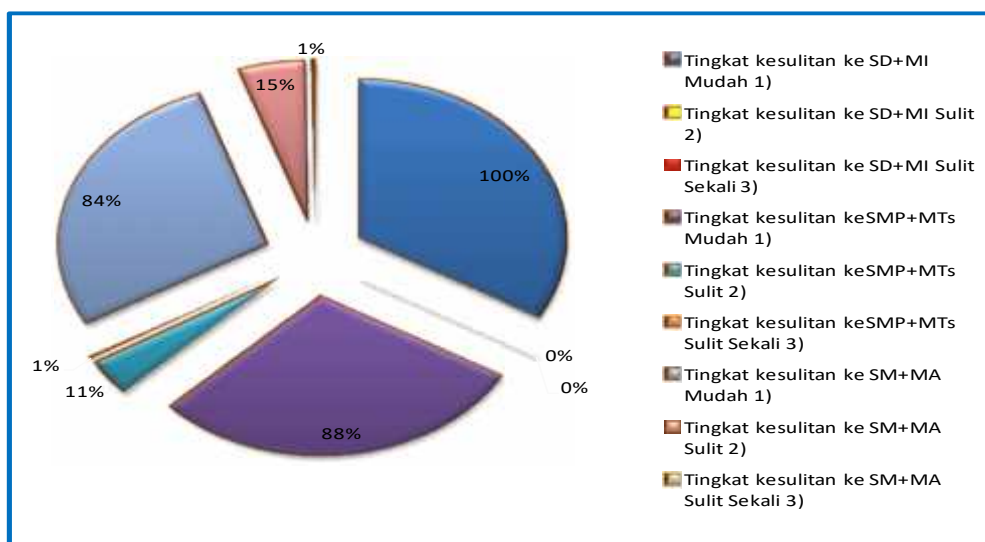
jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA. Kecamatan yang secara geografis letaknya jauh dari ibukota kabupaten serta memiliki kondisi yang cukup sulit tingkat pengetahuannya terhadap baca tulis sangat jauh rentangnya dengan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi yang berbeda. Angka tersebut memiliki keterkaitan erat dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Karena secara tidak langsung, minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut selain karena masih dipengaruhi oleh kultur budaya serta pemahaman yang masih belum menganggap pendidikan formal sebagai suatu kebutuhan. Berikut kecamatan yang memiliki tingkat kesulitan ke sekolah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Jumlah Desa, Desa Terpencil, Tingkat Kesulitan Ke Sekolah

No.	Kecamatan	Desa	Desa	Tingkat kesulitan ke SD+MI			Tingkat kesulitan ke SMP+MTs			Tingkat kesulitan ke SM+MA		
		Seluruhnya	Terpencil	Mudah 1)	Sulit 2)	Sulit Sekali 3)	Mudah 1)	Sulit 2)	Sulit Sekali 3)	Mudah 1)	Sulit 2)	Sulit Sekali 3)
1	Lunyuk	7	5	7	0	0	3	4	0	2	5	0
2	Orong Telu	4	4	4	0	0	3	1	0	0	4	0
3	Alas	8	5	8	0	0	7	1	0	7	1	0
4	Alas barat	8	4	8	0	0	8	0	0	8	0	0
5	Buer	6	4	6	0	0	5	1	0	5	1	0
6	Utan	9	6	9	0	0	9	0	0	8	1	0
7	Rhee	4	1	4	0	0	3	1	0	3	1	0
8	Batulanteh	6	6	6	0	0	4	2	0	4	2	0
9	Sumbawa	8	8	8	0	0	8	0	0	8	0	0
10	Labuhan Badas	7	4	7	0	0	5	1	1	5	1	1
11	Unter Iwes	8	3	8	0	0	8	0	0	7	1	0
12	Moyohilir	10	2	10	0	0	10	0	0	10	0	0
13	Moyo Utara	6	3	6	0	0	5	1	0	5	1	0
14	Moyohulu	12	6	12	0	0	12	0	0	12	0	0
15	Ropang	5	4	5	0	0	4	1	0	4	1	0
16	Lenangguar	4	1	4	0	0	3	1	0	3	1	0
17	Lantung	4	2	4	0	0	3	1	0	2	2	0
18	Lape	4	2	4	0	0	4	0	0	4	0	0
19	Lopok	7	3	7	0	0	7	0	0	7	0	0
20	Plampang	11	6	11	0	0	10	1	0	11	0	0
21	Labangka	5	5	5	0	0	4	1	0	4	1	0
22	Maronge	4	3	4	0	0	4	0	0	4	0	0
23	Empang	10	2	10	0	0	10	0	0	9	1	0
24	Tarano	8	5	8	0	0	7	1	0	7	1	0
Jumlah		165	94	165	0	0	146	18	1	139	25	1

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk jenjang pendidikan SMP / MTs dan SMA/SMK/MA masih ada desa yang sulit memiliki tingkat kesulitan ke sekolah, ada 18 desa yang tingkat kesulitannya sulit untuk akses sekolah jenjang SMP/MTs dan 25 Desa untuk tingkat SMA/SMK/MA, sedangkan untuk tingkat kesulitannya sulit sekali untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA hanya ada 1 desa yang berada di Kecamatan Labuahan Badas.



Gambar 2.4. Persentase Jumlah Desa, Desa Terpencil, Tingkat Kesulitan Ke Sekolah

Selain sarana dan prasarana pendidikan ketersediaan guru merupakan keharusan yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan sektor pendidikan. Ketersediaan fasilitas gedung sekolah, guru dan ruang kelas yang memadai akan menentukan tumbuhnya minat belajar siswa, hal ini tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Sekolah, Siswa, Guru tahun 2015

No	Uraian	SD	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
		Tahun 2015		
1.	Jumlah Sekolah	396	130	57
2.	Jumlah Siswa	49.570	19.165	18.359
3.	Jumlah Guru	4.420	1.919	1.679

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

2.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada sektor kesehatan, strategi-strategi yang dipergunakan antara lain memfasilitasi pengembangan Desa Siaga dan UKBM ditingkat Kecamatan dengan peningkatan peran Puskesmas, Revitalisasi Posyandu dan UKBM lainnya, Penguatan koordinasi lintas sektor, fasilitasi pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan remaja, Optimalisasi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang yang berkualitas, Standarisasi Puskesmas dan Peningkatan jumlah, jenis dan mutu profesionalisme tenaga kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga arah kebijakan dilaksanakan melalui upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat serta menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria.

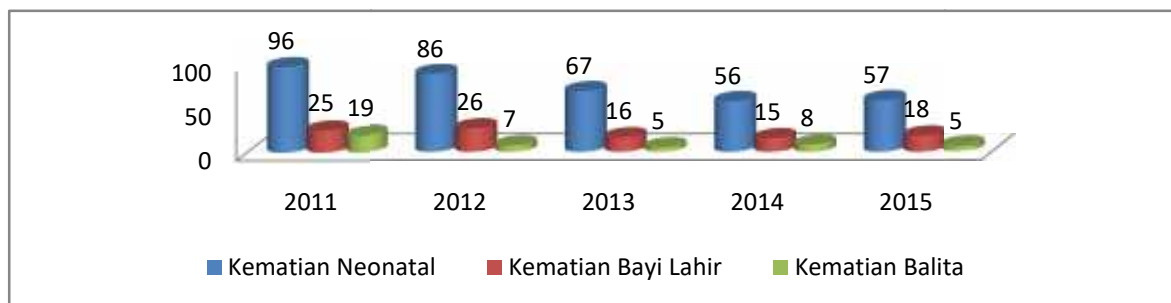
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui revitalisasi dan perkuatan layanan 25 puskesmas, dimana pada tahun-tahun sebelumnya dari 10 puskesmas perawatan dapat ditingkatkan menjadi 23 puskesmas perawatan, sementara 2 puskesmas non perawatan (non rawat inap) terdapat di Puskesmas Seketeng dan Puskesmas Batu Lanteh. Selain itu tersedianya 42 polindes, dan 93 Puskesmas Pembantu.

Demikian pula dengan ketersediaan posyandu sejumlah 700 posyandu, bila dibandingkan dengan jumlah posyandu pada tahun 2011 sejumlah 624 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 76 posyandu, hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya posyandu menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan jumlah posyandu yang ada, bila dibandingkan dengan jumlah balita di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 sebesar 46.502 balita, maka rasio posyandu terhadap balita sebesar 15,05 artinya dalam setiap 1.000 balita mampu dilayani oleh 15 posyandu, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dengan jumlah balita sebanyak 46.207 balita.

Untuk keberadaan jumlah tenaga dokter di Kabupaten Sumbawa, baik dokter PNS dan PTT/Sukarela berjumlah 90 orang dengan rasio 0,21, artinya setiap 1.000 penduduk hanya mampu terlayani oleh 1 dokter, sehingga ketersediaan tenaga dokter masih kurang atau belum mencapai jumlah ideal dibandingkan jumlah penduduk di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, akan tetapi dari tahun ke tahun terus dilakukan peningkatan terhadap jumlah tenaga dokter tersebut. Disamping itu keberadaan tenaga paramedis juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk jumlah paramedis di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 sebanyak 1.110 orang.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.5. Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Dari gambar diatas dapat diketahui jumlah kematian anak balita mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebanyak 5 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 8 kasus. Angka kematian balita menggambarkan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti tingkat kesejahteraan sosial dalam arti luas tingkat kemiskinan penduduk, akses pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat.

Untuk mempertajam penurunan kasus kematian pada balita ini diperlukan peningkatan akses balita terhadap sanitasi, air bersih dan penanganan segera terhadap gejala penyakit. Adapun penyebab kematian tersebut Seperti tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Penyebab Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Tahun 2015

NO	INDIKATOR MORTALITAS/KEMATIAN	JUMLAH KASUS
1	Kematian Neonatus (0-28hr)	
	BBLR	21
	Asfiksia	20
	Tetanus Noenatorum	1
	Sepsi	2
	Kel. Kongenital	5
	Lain-Lain	8
	Jumlah I:	57
2	Kematian Bayi (29 hari – 11 bulan)	
	Pneumonia/ISPA	6
	Diare/Disentri	1
	Lain – lain	11
	Jumlah II:	18
3	Kematian Balita (12 - 59 bulan)	
	Pneumonia/ISPA	1
	DHF	1
	Lain – lain	3
	Jumlah III:	5

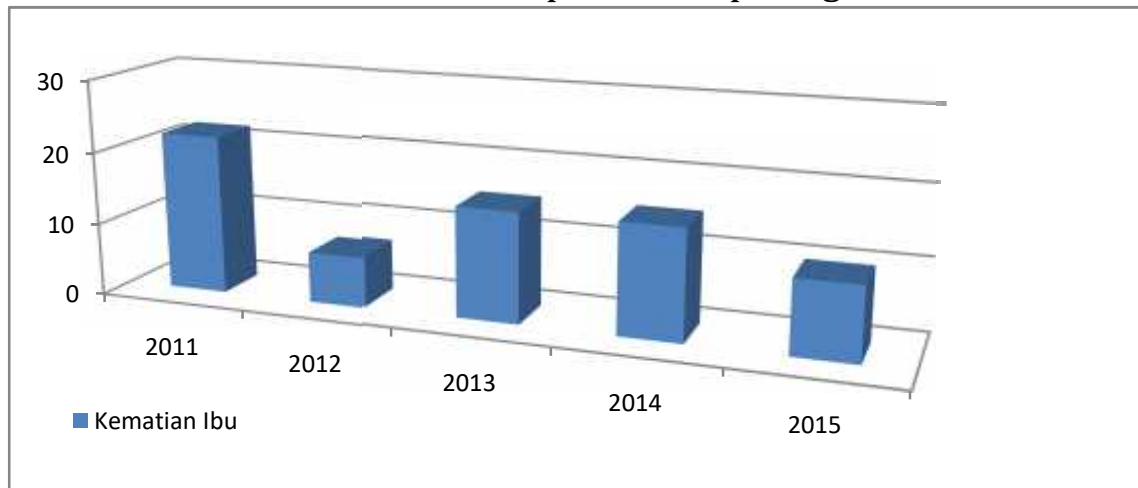
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersali dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan

karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab – sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

Selama tahun 2015 terjadi 10 kasus kematian ibu dengan rincian 1 kasus kematian saat hamil, 5 kasus kematian saat bersalin dan 4 kasus kematian saat nifas, sedangkan jika dirinci berdasarkan umur sebanyak 7 kasus kematian ibu pada usia 20 – 34 tahun dan 3 kasus pada usia >35 tahun. Trend kematian ibu di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.6. Trend Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Dari gambar diatas angka kematian 5 tahun terakhir menunjukkan keadaan yang fluktuatif dimana jumlah kasus kematian tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2012. Adapun penyebab kasus kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2015

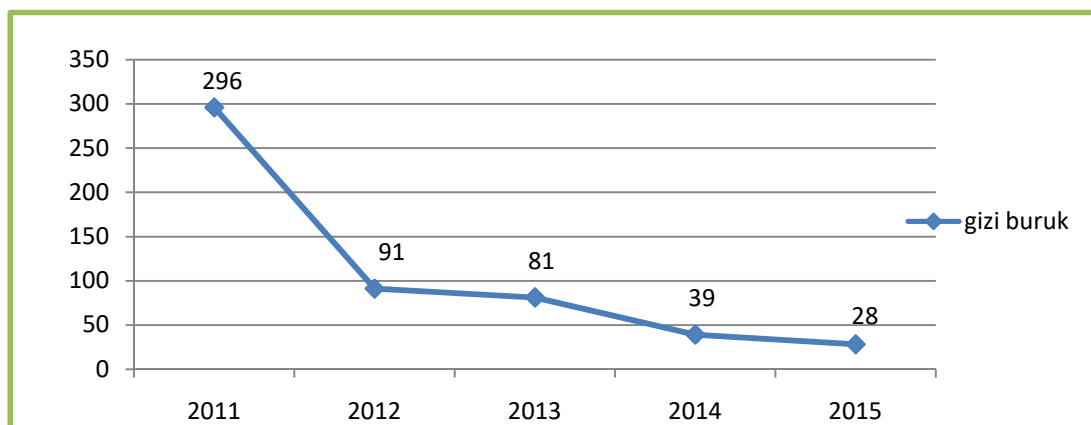
No	Penyebab Kematian Ibu	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Abortus	0	0	0	0	0
2	Perdarahan	6	0	5	10	3
3	Infeksi Jalan Lahir	2	2	2	0	1
4	Eklamsia/Pre Eklamsia	2	2	6	1	3
5	Pertus Lama	3	0	0	0	0
6	emboli	0	0	0	2	0
7	Lain-lain	9	3	2	2	3
TOTAL		22	7	15	15	10

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gizi Buruk

Status gizi masyarakat digambarkan oleh masalah gizi yang dialami golongan penduduk yang rawan gizi terutama balita. Status gizi merupakan akumulasi dari jumlah asupan makanan dan kebutuhan tubuh, jika keseimbangan tersebut terganggu maka akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini tercermin pada pengukuran berat badan atau tinggi badan yang dibandingkan dengan usia penduduk tersebut.

Kasus gizi buruk yang terjadi pada tahun 2015 ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 28 kasus. Jumlah tersebut menyebar di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan laporan dari Puskesmas bahwa perkembangan kasus gizi buruk di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan yang signifikan sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.6. Trend Kematian Ibu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Dari data diatas terlihat bahwa kasus gizi buruk cenderung menurun. Dari 28 kasus gizi buruk yang ditemukan selama tahun 2015 semuanya telah mendapat penanganan dengan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jumlah kematian akibat gizi buruk pada tahun 2015 hanya ada 1 kasus, ini jauh menurun jika dibandingkan dengan kasus kematian akibat gizi buruk pada tahun 2014 yaitu sebanyak 7 kasus dengan jumlah kasus gizi buruk sebanyak 39 kasus. Kematian yang terjadi pada kasus gizi buruk untuk tahun 2015 disebabkan karena adanya penyakit bawaan atau penyerta yang diderita pasien gizi buruk.

Angka kesakitan (Morbiditas)

Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian atas, kondisi ini erat kaitannya dengan tingkat kekebalan seseorang terhadap penyakit dan keadaan kesehatan lingkungan masyarakat. Kasus penyakit terbanyak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 berdasarkan laporan puskesmas dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Jenis Penyakit Terbanyak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Infeksi akut lain pada saluran pernapasan bagian	18.006
2	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (peny. Tulang belulang, radang sendi termasuk reumatik)	12.324
3	Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian	11.343
4	Penyakit kulit infeksi	5.270
5	Penyakit tekanan darah tinggi	7.511
6	Penyakit Alergi	6.291
7	Diare (termasuk tersangka kolera)	8.038
8	Kecelakaan dan ruda paksa	4.195
9	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal	2.824
10	asma	3.052
J U M L A H		78.854

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

2.3. Arsip dan Perpustakaan Daerah

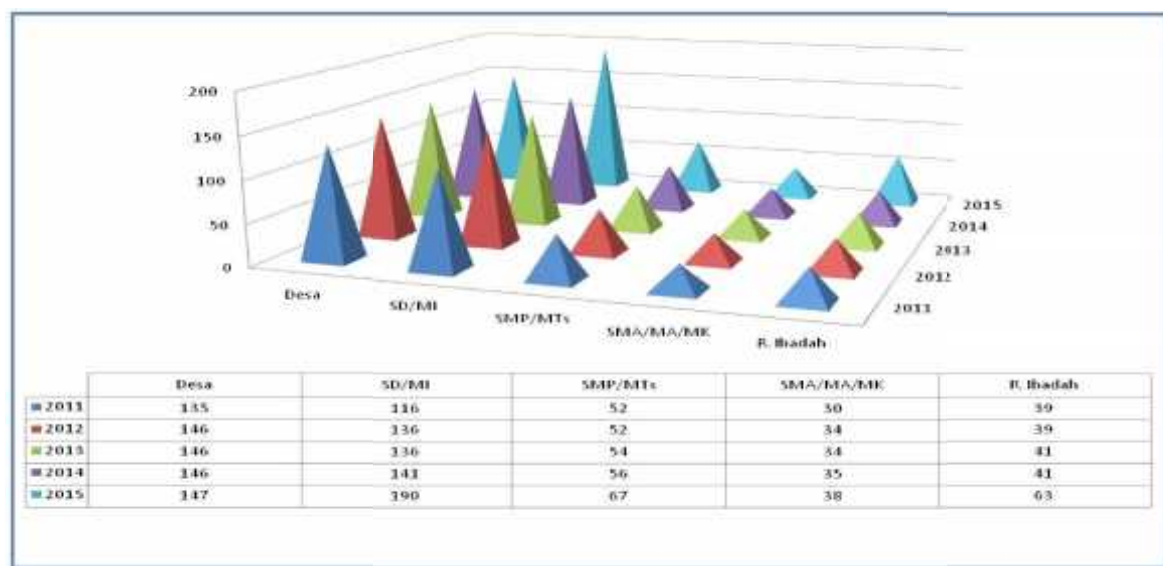
a. Arsip

Arsip adalah data terekam yang seakan-akan tidak mempunyai arti ketika ia disimpan ditempatnya, karena arsip tidak lebih dari sekumpulan kata, rekaman suara atau gambar yang ditata sedemikian rupa. Arsip akan mempunyai kekuatan ketika orang mulai mencari dan memakainya untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pentingnya urusan kearsipan maka pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara bertahap terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan arsip, hal ini ditandai dengan penerapan arsip secara baku pada 6 SKPD pada tahun 2015 dari 5 SKPD pada tahun 2014. Demikian pula dengan pengelola arsip terpadu yang diperlukan sebanyak 90 orang dari 78 orang pada tahun 2014, sementara pengelola arsip terpadu terlatih dari 12 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 20 orang dari tahun 2012-2015

b. Perpustakaan

Untuk mencapai cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan dan beberapa kegiatan yaitu pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, dengan menyediakan buku bacaan bagi pengunjung perpustakaan.

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya perpustakaan desa sebanyak 10 buah, perpustakaan SD/MI sebanyak 4 buah, perpustakaan SMA/MA/SMK 1 buah dan rumah ibadah 1 buah perpustakaan, bertambahnya jumlah perpustakaan sebanyak 16 buah yakni dari 489 perpustakaan pada tahun 2014 menjadi 505 perpustakaan pada tahun 2015. Sedangkan dalam rentang tahun 2011-2015 terjadi peningkatan sebanyak 129 perpustakaan sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber Data : Kantor Arpusda Kabupaten Sumbawa

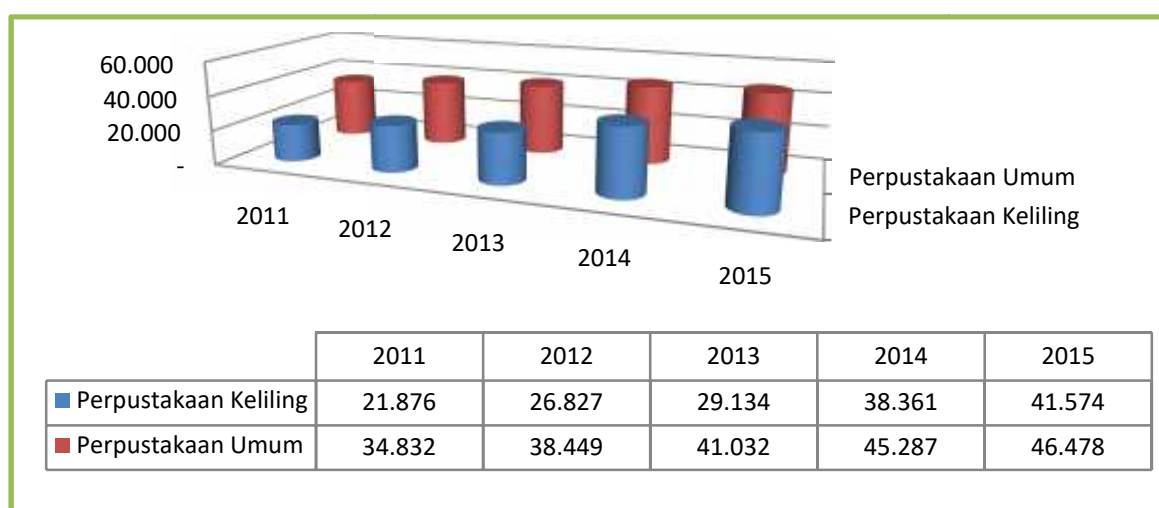
Gambar 2.7. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, akan memberikan kemudahan bagi proses belajar masyarakat baik di sekolah maupun di luar sekolah tempat perpustakaan tersebut berada.

Dengan kata lain kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan termasuk perpustakaan.

Perpustakaan dan bahan bacaan adalah dua hal yang saling bertautan karena di perpustakaanlah bahan pustaka dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan (didistribusikan) kepada para pembaca/pemakai perpustakaan. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan tersebut, hal ini ditandai dengan penambahan jumlah koleksi buku dari tahun ke tahun, dengan jumlah koleksi buku pada tahun 2015 sebanyak 38.998 eksemplar dari 35.023 pada tahun 2014.

Budaya baca masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung umum yang meningkat, demikian pula dengan pengunjung perpustakaan keliling yang juga mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber Data : Kantor Arpusda Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.7. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling Tahun 2011-2015

2.4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sumbawa yang memiliki luas 6.643,98 Km² didiami penduduk sebanyak 441.102 jiwa yang tersebar di 24 Kecamatan, terdiri dari 224.974 laki-laki dan 216.128 perempuan yang berarti

penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat pada kecamatan Sumbawa dengan jumlah penduduk sebesar 60.189 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Lantung dengan jumlah penduduk sebesar 2.848 jiwa.

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka setiap km² dihuni oleh 66 jiwa, ini memperlihatkan penduduk Kabupaten Sumbawa masih jarang. Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung suatu wilayah. Rasio kepadatan penduduk ini dapat menggambarkan distribusi penduduk yang terkonsentrasi di suatu tempat dan memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk misalnya dengan membuat program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk. Distribusi penduduk tiap kecamatan dan tingkat kepadatan masing-masing diberikan pada tabel berikut.

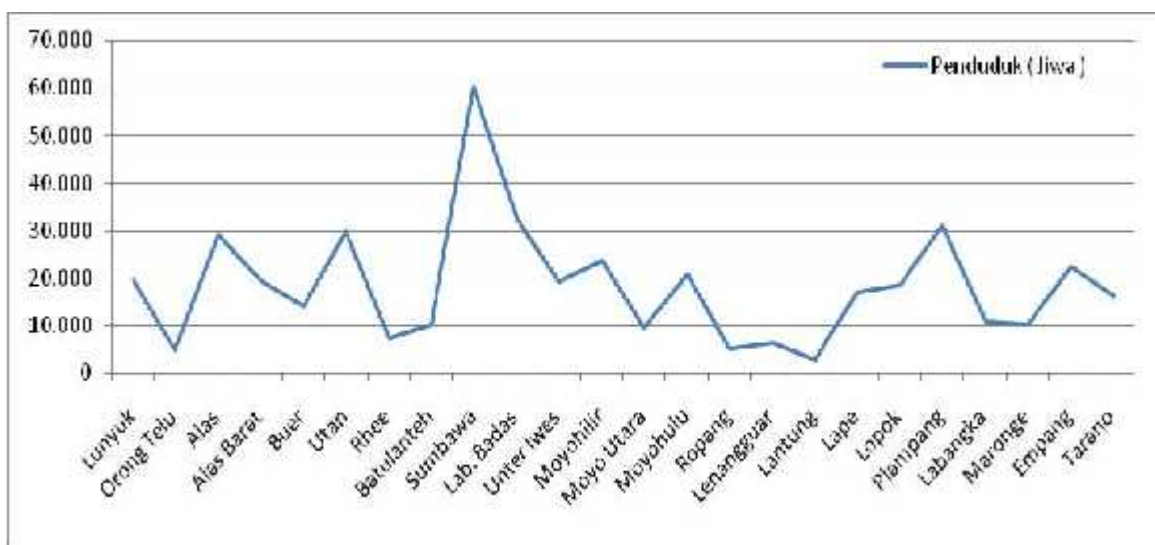
Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah	Kepadatan (Jiwa / Km ²)
1.	Lunyuk	513,74	19.961	39
2.	Orong Telu	465,97	4.749	10
3.	Alas	123,04	29.046	236
4.	Alas Barat	168,88	19.395	115
5.	Buer	137,01	14.049	103
6.	Utan	155,42	29.866	192
7.	Rhee	230,82	7.211	31
8.	Batulanteh	391,4	10.370	26
9.	Sumbawa	44,83	60.189	1343
10.	Lab. Badas	435,89	32.611	75
11.	Unter Iwes	82,38	19.321	235
12.	Moyohilir	186,79	23.532	126
13.	Moyo Utara	90,8	9.583	106
14.	Moyohulu	311,96	20.629	66
15.	Ropang	444,48	5.123	12
16.	Lenangguar	504,32	6.432	13
17.	Lantung	167,45	2.848	17
18.	Lape	204,43	17.098	84
19.	Lopok	155,59	18.572	119
20.	Plampang	418,69	30.887	74
21.	Labangka	243,08	10.702	44
22.	Maronge	274,75	10.233	37
23.	Empang	558,55	22.442	40
24.	Tarano	333,71	16.253	49
Jumlah		6.643,98	441.102	66

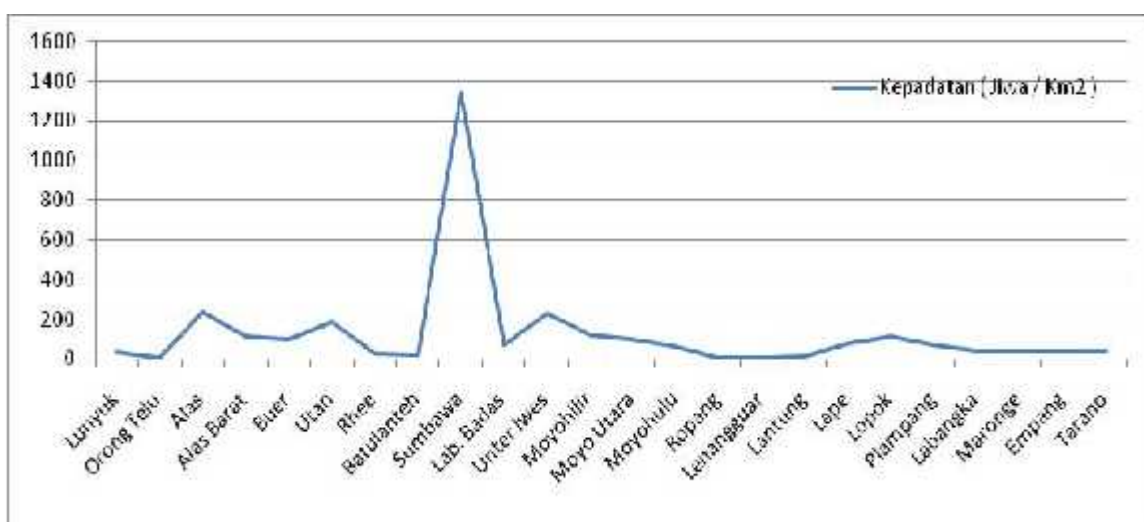
Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa

Sebaran penduduk Kabupaten Sumbawa terutama terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Sumbawa yaitu 13,65%. Kuatnya kecenderungan pemusatan ini ditunjukkan oleh grafik pola konsentrasi penduduk di kecamatan lainnya yang cenderung *merata* dari 7,39% di Lab. Badas sampai Lantung sebesar 0,65% sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah.

Pola sebaran penduduk ini relatif sama dengan pola sebaran kepadatan penduduk yang juga menunjukkan pemusatan yang kuat di wilayah Kecamatan Sumbawa, meski apabila dirata-ratakan pada tingkat kabupaten, maka kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa sangat rendah.



Gambar 2.8. Sebaran Penduduk Kabupaten Sumbawa



Gambar 2.9. Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Sumbawa

Kedua grafik di atas memberi gambaran kependudukan Kabupaten Sumbawa baik dilihat dari sisi jumlah jiwa maupun dari sisi keruangan. Untuk mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Data kependudukan memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam menentukan suatu kebijakan. Pencatatan dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintahan maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan menjadi instrumen kunci keberhasilan program - program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan sudah menghasilkan data base kependudukan untuk Kabupaten Sumbawa. Selama ini Pemerintah Kabupaten hanya menggunakan data yang dihasilkan dari kantor statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Kelemahan data statistik yang disajikan adalah bahwa data tersebut hanya dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (10 tahun atau 5 tahun), sehingga untuk memperoleh data tahunan digunakan data proyeksi atau data perkiraan yang dihitung dari dua atau tiga tahun pendataan penduduk.

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil telah diimplementasikan melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah/datang serta dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Kegiatan administrasi kependudukan ini menghasilkan dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

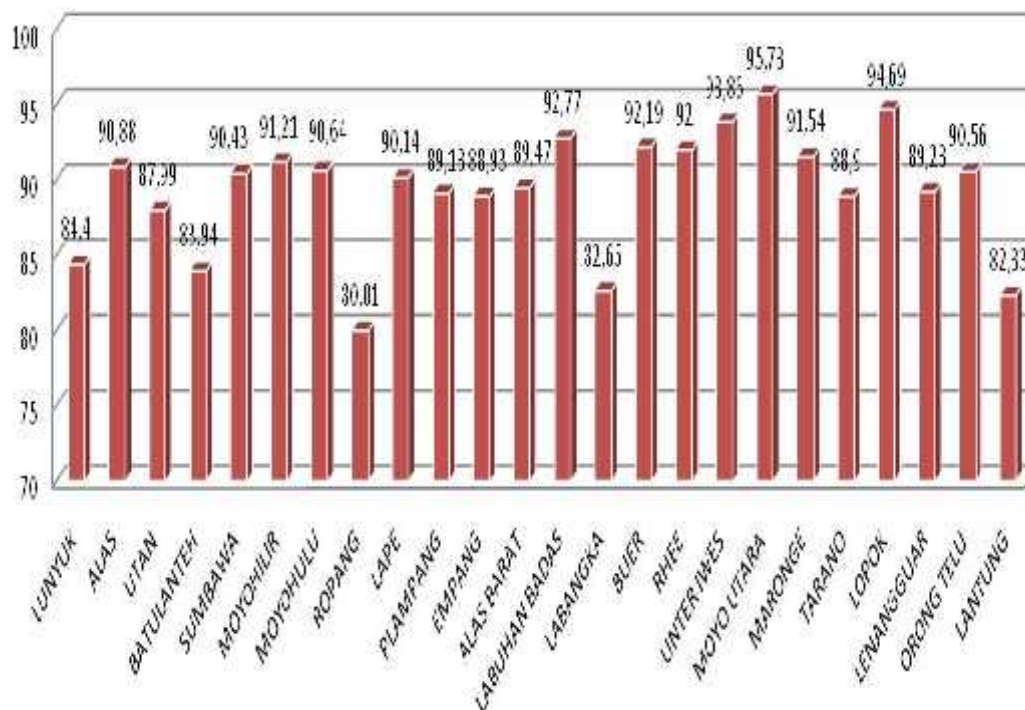
Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga dan dikepalai oleh seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (K K) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Jumlah penduduk yang telah memiliki dan yang belum memiliki kartu keluarga di Kabupaten Sumbawa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk yang memiliki KK dan Tidak Memiliki KK di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KK	JUMLAH PENDUDUK TIDAK MEMILIKI KK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	LUNYUK	5.188	959	6.147
2	ALAS	8.897	893	9.790
3	UTAN	9.686	1.322	11.008
4	BATULANTEH	2.907	556	3.463
5	SUMBAWA	16.706	1.768	18.474
6	MOYOHILIR	7.302	704	8.006
7	MOYOHULU	6.741	696	7.437
8	ROPANG	1.545	386	1.931
9	LAPE	5.241	573	5.814
10	PLAMPANG	8.393	1.024	9.417
11	EMPANG	6.821	849	7.670
12	ALAS BARAT	6.400	753	7.153
13	LABUHAN BADAS	9.239	720	9.959
14	LABANGKA	2.735	574	3.309
15	BUER	4.413	374	4.787
16	RHEE	2.219	193	2.412
17	UNTER IWES	6.040	395	6.435
18	MOYO UTARA	3.113	139	3.252
19	MARONGE	3.105	287	3.392
20	TARANO	4.475	559	5.034
21	LOPOK	5.635	316	5.951
22	LENANGGUAR	1.989	240	2.229
23	ORONG TELU	1.334	139	1.473
24	LANTUNG	1.025	220	1.245
JUMLAH		131.149	14.639	145.788

Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Berikut gambaran kepemilikan kartu keluarga di rinci perkecamatan Sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Gambar 2.10. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2015

Dari tabel dan grafik diatas, menggambarkan dari jumlah keluarga di Kabupaten Sumbawa yaitu 145.788 sebesar 89,96% telah mempunyai kartu keluarga.

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah untuk mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas, sebagai contoh urusan dengan bank, mengurus ASKESKIN, untuk memperoleh bantuan tunai, untuk mengurus sertifikat tanah, untuk mengurus perkawinan, dan lain sebagainya.

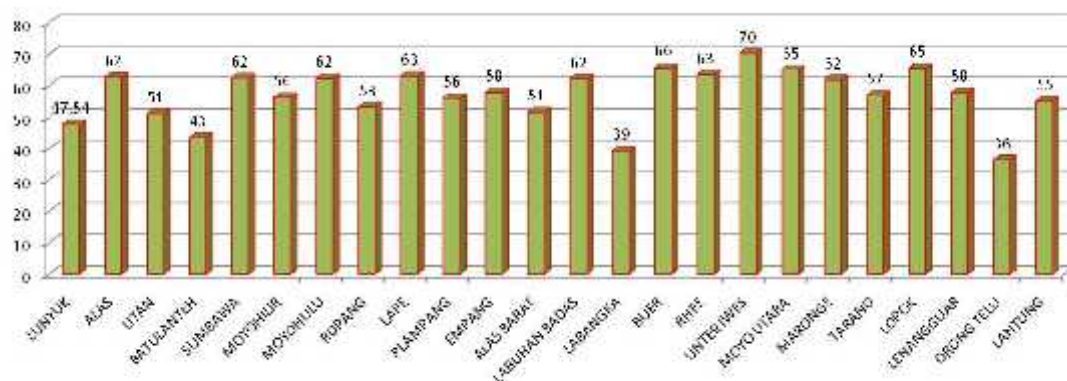
Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang telah mendapatkan atau memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8. Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KTP	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP
1	LUNYUK	7846	16504
2	ALAS	16.432	26314
3	UTAN	14.717	28916
4	BATULANTEH	4.189	9.685
5	SUMBAWA	31.440	50501
6	MOYOHILIR	11.860	21.174
7	MOYOHULU	12.119	19515
8	ROPANG	2.890	5448
9	LAPE	9.657	15385
10	PLAMPANG	14.138	25352
11	EMPANG	12.080	20.936
12	ALAS BARAT	9.826	19121
13	LABUHAN BADAS	16.170	26127
14	LABANGKA	3.323	8514
15	BUER	8.384	12800
16	RHEE	4.012	6342
17	UNTER IWES	11.825	16889
18	MOYO UTARA	5.471	8436
19	MARONGE	5.531	8972
20	TARANO	7.881	13895
21	LOPOK	10.480	16021
22	LENANGGUAR	3.353	5820
23	ORONG TELU	1.532	4238
24	LANTUNG	1.809	3306
JUMLAH		226.965	390211

Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Berikut gambaran kepemilikan kartu tanda penduduk di rinci perkecamatan Sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Gambar 2.11. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2015

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui jumlah kepemilikan KTP di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Desember 2015 sebanyak

226.965 orang dengan jumlah tertinggi kepemilikan KTP berada di Kecamatan Sumbawa yaitu sebanyak 31.440 orang atau sebesar 62 % dan yang terendah berada di Kecamatan Orong Telu yaitu sebanyak 1.532 orang atau sebesar 36 %.

Akte merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Sumbawa yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh masyarakat jangan takut dan enggan untuk mendaftarkan segera kelahiran anaknya, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak, beban tugas kepada pemerintah tidaklah mudah dan harus melibatkan semua pihak oleh karenanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang sinergi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Hak Identitas Berdasarkan KHA dan UU No. 23 /2002 Versi Komisi Perlindungan Anak (KPA) salah satu hal penting yang melekat pada diri kita adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan.

Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan

pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak. Posisi Anak dalam Konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu : “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi”.

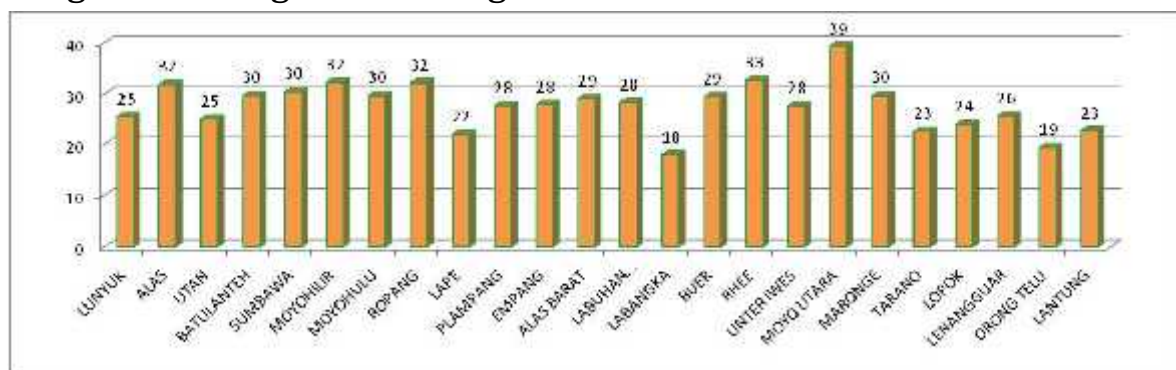
Manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Untuk mengetahui jumlah kepemilikan akta di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA LAHIR
1	LUNYUK	23.198	5.908
2	ALAS	36.535	11.607
3	UTAN	39.807	9.968
4	BATULANTEH	13.290	3.943
5	SUMBAWA	68.968	21.025
6	MOYOHILIR	28.554	9.184
7	MOYOHULU	25.896	7.682
8	ROPANG	7.067	2.268
9	LAPE	21.376	4.698
10	PLAMPANG	35.294	9.770
11	EMPANG	28.125	7.838
12	ALAS BARAT	26.376	7.670
13	LABUHAN BADAS	37.321	10.580
14	LABANGKA	12.456	2.234
15	BUER	17.756	5.236
16	RHEE	9.119	2.977
17	UNTER IWES	23.181	6.394
18	MOYO UTARA	11.633	4.576
19	MARONGE	12.426	3.679
20	TARANO	19.616	4.432
21	LOPOK	22.013	5.282
22	LENANGGUAR	8.019	2.053
23	ORONG TELU	5.809	1.125
24	LANTUNG	4.454	1.013
JUMLAH		538.289	151.142

Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Berikut gambaran kepemilikan akte kelahiran di rinci perkecamatan Sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber: Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

Gambar 2.12. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2015

Dari tabel dan grafik di atas menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sumbawa terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 28,08% (538.289 jiwa). Kalau dilihat kepemilikan akta tertinggi berada di Kecamatan Moyo Utara yaitu 39,34% dari jumlah penduduknya dan terendah berada di Kecamatan Labangka 17,94%

Data dokumen kependudukan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tergambar pada pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10. Data Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
KTP yang diterbitkan	160.990	219.739	224.968	235.870	226.956
Akta perkawinan yang dikeluarkan	188	209	81	119	128
Akta Kelahiran yang dikeluarkan	24.850	8.568	3.292	16.202	16.547
Akta Kematian yang dikeluarkan	17	35	35	33	60
Akta Perceraian yang dikeluarkan	4	4	1	2	13

Sumber : Data SIAK sampai dengan Bulan Desember 2015 yang diolah

2.5. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

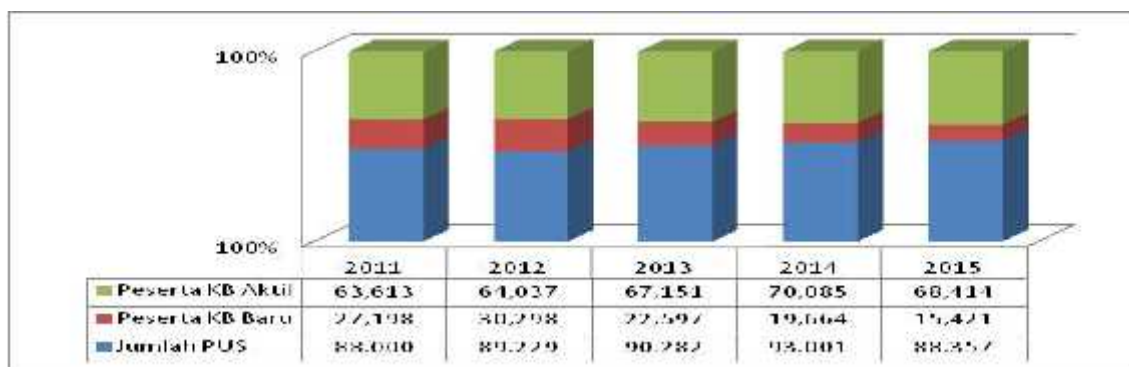
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan tidak hanya untuk pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) tetapi juga sebagai obyek (human resources) pembangunan seluruh siklus

kehidupan manusia. Secara garis besar pembangunan penduduk meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu:

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk
4. Data dan informasi penduduk
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai basis masyarakat melalui program Keluarga Berencana merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kab. Sumbawa. Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.

Berdasarkan hasil pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan PUS tahun sebelumnya, PUS pada tahun 2014 sebanyak 93.001 PUS sedangkan pada tahun 2015 sejumlah 88.357 PUS. Perkembangan jumlah PUS pertahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tergambar sebagai berikut :

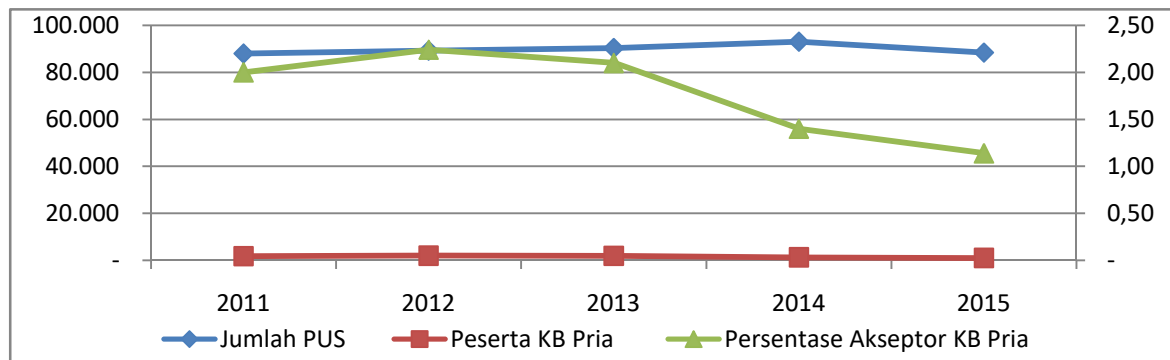


Sumber : BKBPP Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.13. Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif Tahun 2011-2015

Peran serta masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan program keluarga berencana terus ditumbuhkan, antara lain meningkatkan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga

berencana. Terhadap peserta KB tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita saja namun kaum pria juga merupakan objek yang perlu mendapat perhatian untuk ditangani. Terkait dengan peserta KB aktif pria sampai dengan akhir tahun 2015 berjumlah 1.007 akeptor, masih rendahnya peran serta pria dalam ber KB sehingga perlu dilakukan pendekatan peran serta pria dalam ber-KB terhadap masyarakat, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber : BKBPP Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.14. Jumlah PUS, Peserta KB Pria dan Persentase KB Pria terhadap PUS di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

Dalam hal urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BKBPP Kabupaten Sumbawa melalui remaja di sekolah dan masyarakat kecamatan membentuk kelompok PIK-KRR. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengupayakan dan mengkondisikan situasi serta proses kehidupan yang kondusif dalam mewujudkan kepekaan terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan penyadaran serta pembentukan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga peduli pada perempuan dan anak.

Terkait dengan penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi sampai dengan tahun 2015 sejumlah 74 kasus tindak kekerasan, dengan rincian 23 kasus seksual, 10 kasus penelantaran terhadap perempuan dan sisanya 41 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 65 kasus Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terjadi peningkatan kasus akan tetapi dalam rentang waktu 2011-2015 rata-rata kasus tindak kekerasan mengalami penurunan. sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Dari grafik diatas dapat dilihat kasus KDRT tertinggi yang terjadi ada di Kecamatan Sumbawa dengan 21 kasus KDRT, Data kasus KDRT yang terjadi tergambar pada pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11. Kasus KDRT di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015

NO:	KECAMATAN	KORBAN		PELAKU		KATEGORI KORBAN		KATEGORI PELAKU		HUB PELAKU DGN KORBAN		PENYELESAIAN				JUMLAH
		L	P	L	P	ANAK	BUKAN ANAK	ANAK	BUKAN ANAK	KEL	BUKAN KEL	DAMAI	MEDIASI	PROSES / KONSELING	CERAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	Alas Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	Alas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	Buer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	Utan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)	Rhee	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
(6)	Tarano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(7)	Empang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8)	Lape	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-
(9)	Moyo Utara	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
(10)	Moyo Hilir	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
(11)	Unter Iwis	-	3	3	-	-	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-
(12)	Sumbawa	7	14	19	2	5	16	3	18	17	14	21	-	-	-	-
(13)	Lab. Badas	-	7	7	-	-	7	-	7	7	-	7	-	-	-	-
(14)	Batulanteh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(15)	Lunyuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(16)	Ropang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(17)	Lantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(18)	Orong Telu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(19)	Lerangguar	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
(20)	Moyo Hulu	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
(21)	Lopok	-	2	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
(22)	Labangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(23)	Maronge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(24)	Plampang	-	2	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-
JUMLAH		7	34	39	2	6	35	3	38	37	14	40	-	1	-	-

Sumber : BKBPP Kab. Sumbawa

2.6. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan

terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2015 adalah :

Tabel 2.12. Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa Tahun 2015

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS Tahun 2014	PMKS Yang Tertangani	PMKS Yang Mendapatkan Bantuan	Jumlah PMKS Tahun 2015
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	385	2	-	383
2	Anak Terlantar	Jiwa	3.297	137	56	3.160
3	Anak Yang Berhadapan dgn Hukum (ABH)	Jiwa	19	19	-	-
4	Anak Jalanan	Jiwa	6	-	-	6
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	132	1	1	131
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Jiwa	18	18	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jiwa	946	-	-	946
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4.965	40	40	4.925
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa	1.020	163	159	902
10	Tuna Susila	Jiwa	43	1	-	42
11	Gelandangan	Jiwa	17	-	-	17
12	Pengemis	Jiwa	2	-	-	2
13	Pemulung	Jiwa	42	-	-	42
14	Kelompok Minoritas	Jiwa	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLBP)	Jiwa	223	20	20	203
16	Orang dengan HIV/AIDS	Jiwa	40	-	-	45
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	20	20	-	-
18	Korban Trafficking	Jiwa	4	2	-	2
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	120	18	-	102
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	105	40	-	65
21	Korban Bencana Alam	Jiwa	-	2.099	2.099	-
22	Korban Bencana Sosial	Jiwa	-	222	222	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	3.328	50	-	3.278
24	Fakir Miskin	Jiwa	14.244	12.214	12.214	12.319
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	KK	218	105	-	113
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	543	118	118	425
Jumlah			29.737	15.289	14.929	27.108

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa

Kesejahteraan rakyat tidak dapat terwujud secara langsung, karena menyangkut beragam aspek dengan jangka waktu yang relatif panjang

untuk menuju ke sasaran akhir. Untuk itulah dilakukan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus, sehingga dapat tercipta tatanan, kondisi, peluang dan kesempatan bagi publik untuk mengembangkan kreatifitas dan prakarsa serta mampu menjadi kekuatan utama pendorong munculnya kemandirian kolektif masyarakat.

Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya diantaranya melalui peningkatan pelayanan perlindungan sosial dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial masyarakat, sehingga mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Seiring dengan kemajuan pada sektor kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan penanganan masalah sosial ternyata masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan dan secara nyata kita masih dihadapkan pada permasalahan "konvensional" terutama kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan tindak kekerasan, baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyalurannya ke dalam masyarakat bagi warga negara yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, terlantar atau tersesat, dan melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Penyandang cacat yang sampai saat ini belum maksimal disentuh dalam program yang relevan, merupakan masalah kesejahteraan sosial yang bersifat patologis. Hal ini dapat dibuktikan karena

penyandang cacat tidak dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya secara individu. Oleh sebab itu, maka diperlukan pelayanan khusus dalam penanganan masalah sosial yang dialami oleh penyandang cacat tersebut.

Di Kabupaten Sumbawa Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ini dilaksanakan dengan pelayanan KIE Konseling serta kampanye sosial. Selain itu, dilaksanakan juga Pelayanan dan penyantunan terhadap masyarakat usia lanjut. Masyarakat kita sebagai penyandang cacat yang memiliki kemampuan harusnya dapat di "mandirikan" dengan adanya pelatihan penyandang cacat yang di lakukan oleh Dinas Sosial. Peran keluarga, lingkungan bahkan diri mereka sendiri mampu motivasi mereka untuk bekerja, memiliki kemampuan pemberdayaan diri sendiri, mereka mampu mengakses dunia lain, mampu bersosialisasi dengan masyarakat, mampu membentuk jaringan, Minimal antar penyandang cacat & masyarakat sekitar. Penanganan secara khusus dilakukan terhadap anak-anak terlantar, jumlah anak terlantar dan bermasalah sosial diberikan pelatihan keterampilan melalui pemberian teori serta praktek sehingga diharapkan antara ilmu serta teori yang diperoleh akan dapat diaplikasikan secara langsung. Terhadap anak-anak terlantar yang telah memiliki bakat, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga memberikan pendampingan untuk pengembangan bakat dan keterampilan yang sudah dimiliki.

Pelaksanaan program tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat sebagaimana termasuk dalam kelompok diatas. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap kelompok masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan yang memiliki upaya keterlibatan dalam peningkatan sosial ekonomii masyarakat. Sebagai gambarnya, Kabupaten Sumbawa secara rutin melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna. Lembaga kepemudaan ini secara tidak langsung ikut mempengaruhi dinas sosial kabupaten sumbawa terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan yang dilaksnakan.

Adapun data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa dirinci per kecamatan tahun 2015 seperti tergambar pada pada tabel berikut ini :

2.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Berdasarkan UU No 13. tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja, Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja misalnya ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya.

Untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama dengan dunia usaha serta masyarakat ikut berperan aktif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa.

Ketersediaan lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolak ukur kesejahteraan masih identik dengan pekerjaan dan besaran upah yang didapatkan. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk mandiri dan berwirausaha yang masih rendah. Pengaturan pengupahan bagi tenaga kerja merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan, hal ini dimaksudkan agar upah terendah dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan.

Untuk mengatasi pengangguran di Kabupaten Sumbawa diantaranya adalah melakukan perluasan kesempatan kerja. Sejumlah upaya dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Meskipun demikian, upaya itu juga berbeda-beda tergantung pada jenis pengangguran itu. Beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran di

Kabupaten Sumbawa yaitu dengan peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, Pengelolaan permintaan masyarakat / dunia usaha akan tenaga kerja, Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja terutama yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, Program pendidikan dan pelatihan kerja baik terhadap pencari kerja maupun pekerja dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensinya, dapat juga melalui Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan mengembangkan upaya memunculkan dan menumbuhkan wiraswasta muda. Kondisi angkatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14. Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)	294998	299423	303670	308043	312404
2	Jumlah Angkatan Kerja	197281	216315	217400	218976	217621
3	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	97717	83108	86270	89067	94783
4	Jumlah Penduduk Bekerja	186862	205688	208585	209615	208489
5	Jumlah Pengangguran Terbuka	10419	10627	8835	9361	9132
6	TPAK (%)	66,88	72,24	71,59	71,09	69,66
7	TPT (%)	5,28	4,91	4,06	4,27	4,2

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa

Keterbatasan kesempatan kerja mendorong adanya mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Namun demikian, kualitas tenaga kerja yang ada masih rendah karena sebagian besar hanya berpendidikan dasar. Jumlah penempatan tenaga kerja di luar negeri berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15. Negara tujuan dan jumlah tenaga kerja di luar negeri 2013 - 2015

No	Negara Tujuan	Tahun			s/d September 2016
		2013	2014	2015	
1	Saudi Arabia	41	42	24	11
2	Singapura	79	80	95	293
3	U.E.A	1.674	137	209	264
4	Brunei	368	384	254	415
5	Hongkong	357	438	224	330
6	Oman	383	2.511	187	-
7	Qatar	662	208	60	-
8	Bahrain	312	828	88	-
9	Malaysia	170	195	210	142
10	Taiwan	42	197	114	273
TOTAL		4.088	5.020	1.465	1.728

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumbawa

Pemerintah Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya melaksanakan peningkatan terhadap mobilitas kerja melalui penyebaran informasi pasar kerja lewat media massa dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan.

Pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 3.772 orang yang terdiri dari pekerja yang mendaftar pekerjaan didalam negeri sebanyak 300 orang dan yang mendaftar diluar negeri sebanyak 3.472 orang, tingkat pendaftaran pencari kerja ini mengalami penurunan sebesar 32,24% dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk penempatan pencari kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 37,09%.

Peningkatan koordinasi terhadap pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terus dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian hak-hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan perjanjian kerja bersama dan pembinaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk itu ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan setiap tahunnya. Adapun kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2015 kasus yang telah tertangani adalah berupa kasus PHK dan Tuntutan Hak sebanyak 29 kasus, pengupahan/UMK sebanyak 6 kasus, BPJS sebanyak 3 kasus, outsourcing sebanyak 3 kasus, TKA sebanyak 1 orang dan K3 sebanyak 4 orang.

Terhadap kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja yang ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja, maka usaha peningkatan pengawasan dari tahun 2011-2015 terlihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan Tahun 2011-2015

No	Kegiatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Inspeksi	50	75	115	87	68
2	Kontrol	200	275	280	150	-
3	Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	8	8	9	3	6
4	Pemeriksaan Kasus PHK	22	18	12	19	25
5	Pemeriksaan Kasus Jam Kerja	29	29	2	-	-
Jumlah		309	405	418	259	99

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumbawa

2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dikabupaten Sumbawa, pelaksanaan dan keterlibatan pemerintah dan masyarakat Kabuapten Sumbawa telah dimulai sejak tahun 1996 dimana untuk kali pertama Kabupaten Sumbawa menjadi daerah tujuan. Dalam perkembangannya program ini telah mampu memberikan gambaran bahwa program tersebut memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan di kabupaten sumbawa secara umum.

Masalah yang masih sering muncul antara lain adalah tidak ditepatinya jadwal terpadu pelaksanaan penyiapan lokasi penempatan dan pemberangkatan transmigrasi, lokasi permukiman transmigrasi yang berubah-ubah, yang berdampak pada anggapan tingginya tingkat ketidakpastian program transmigrasi, masih terjadinya kecemburuan sosial antar penduduk setempat dengan warga transmigran utamanya kepada transmigran yang berhasil.

Munculnya masalah baru ketransmigrasian di era otonomi daerah antara lain adalah terjadinya penggantian para pelaku program transmigrasi baik di daerah pengirim maupun di daerah penerima.

Kondisi demikian bagi keberlangsungan dan kelancaran program transmigrasi kurang menguntungkan. Seringnya pergantian pimpinan, maka sering pula terjadi penggantian kebijakan teknis pelaksanaan di lapangan. Sehingga sering pula menimbulkan adanya perubahan lokasi yang sejak awal perencanaan program sudah disepakati dalam kerjasama antara kabupaten pengirim dan kabupaten penerima. Bahkan terjadi pula adanya pembatalan pembangunan permukiman transmigrasi dengan alasan teknis. Berikut lokasi dan jumlah penempatan transmigran di kabupaten sumbawa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17. Data Lokasi dan Jumlah Transmigran di Kabupaten Sumbawa

No	Lokasi	Jumlah KK	Daerah Asal	Daerah Setempat
1	Labangka I	355	280	75
2	Labangka II	250	200	50
3	Labangka III	270	216	54
4	Labangka IV	275	220	55
5	Labangka V	300	240	60
6	Tolo' Oi	240	192	48
7	Prode SP I	100	60	40
8	Prode SP II	150	90	60
9	Prode SP III	283	170	113
10	Sampar Goal SP I	200	80	120
11	Sampar Goal SP II	100	40	60
12	Buin Batu	200	80	120
13	Brang Lamar	100	20	80
TOTAL		2.823	1.888	935

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumbawa

Pelaksanaan ketransmigrasian di Kabupaten Sumbawa di implementasikan antara lain melalui :

- Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan KTM Labangka
- Pengembangan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- Pengembangan Usaha Ekonomi.

2.9. Kebudayaan

Pembangunan budaya dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah semakin derasnya arus informasi dan kebudayaan global, untuk pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga

diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yang diarahkan pada pembinaan terhadap sanggar seni yang hingga saat ini tercatat sebanyak 83 sanggar seni, yakni sama dengan tahun sebelumnya, akan tetapi bila dirata-ratakan dari tahun 2011-2015 terjadi penambahan sanggar seni selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan geliat berkesenian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa, dan Festival Samawa Malanti Budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah.

Pelaksanaan berbagai event kebudayaan semestinya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dan rutinitas tahunan semata. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata harus sudah melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan event kebudayaan yang ada untuk mengukur serta menilai sejauh mana dampak pelaksanaan kegiatan tersebut. Kebudayaan sebagai salah satu aspek dalam pariwisata dapat dijadikan sebagai suatu potensi dalam pengembangan pariwisata itu. Hal ini disebabkan, dalam pengembangan pariwisata pada suatu negara atau suatu daerah sangat terkait dengan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu Negara.

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan, benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta dalam

melestarikannya, Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

No	Nama	Alamat
1	Makam Sampar	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
4	Bala Kuning	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kel. Pekat Kec. Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kec. Tarano
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kec. Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kec. Lopok
15	Batu Tata	Desa Punik Kec. Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kec. Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kec. Ropang
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kec. Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kec. Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kec. Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kec. Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kec. Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kec. Utan
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kec. Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kec. Plampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kec. Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kec. Alas
35	Makam Dea Busing	Kec. Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kec. Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kec. Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kec. Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kec. Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kec. Alas

Sumber : Dinas Porabudpar Kab. Sumbawa

Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara

komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai leading sektor, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal. Untuk menunjang pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta.

2.10. Pemuda dan Olahraga

Dalam pembangunan pemuda dan olahraga ditengah keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dengan melakukan pembenahan pada berbagai aspek, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi induk olah raga beserta organisasi cabang olah raga, penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah, serta pertandingan olahraga antar klub serta antar kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2015 adalah dengan berperan sertanya pemuda dalam memanfaatkan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini ditandai dengan berkembangnya organisasi kepemudaan yang aktif sejumlah 19 buah dengan prestasi-prestasi yang berhasil diraih diberbagai bidang seperti sebagai Duta Seni Wakil Indonesia Timur dalam rangka Literasi Sastra yang dilaksanakan di Frankfur Jerman dan Negara-negara sekitarnya, Duta Pertukaran Mahasiswa ke Norwegia dan sebagai peserta Jambore Internasional di Jepang, serta pemuda pelopor tingkat provinsi dengan prestasi dibidang pangan, bidang pendidikan dan bidang teknologi tepat guna.

Sampai saat ini peranan pemuda di Kabupaten Sumbawa masih mengalami pasang surut. Indikator sederhana dapat kita lihat pada

bentuk keterlibatan pemuda baik secara individual maupun kelembagaan dalam berbagai sektor pembangunan. Orientasi dalam pembinaan kepemudaan cenderung kurang menjadikan para pemuda menjadi pelaku-pelaku yang terampil dan produktif, Organisasi kepemudaan yang ada kurang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan hal tersebut, pembinaan kepemudaan perlu direvitalisasi sedemikian rupa sehingga, pemuda yang memiliki potensi besar itu menjadi kekuatan penggerak yang ampuh dalam proses pembangunan ekonomi

Perubahan orientasi yang amat mendasar ialah bahwa kegiatan berolahraga tidak selalu dalam pengertian olahraga kompetisi dan pencapaian prestasi setinggi-tingginya, tetapi juga tertuju pada tujuan lainnya, seperti untuk kebugaran jasmani, kesehatan, keelokan bentuk tubuh, pengobatan atau Pencegahan penyakit berbahaya. Memasuki abad ke-21, semakin tajam arah orientasi olahraga ke arah tujuan yang bersifat ekonomi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang bersifat tidak langsung yakni derajat kebugaran jasmani dan kesehatan yang baik, yang diperoleh dari kegiatan berolahraga, memberikan sumbangan terhadap menurunnya biaya perawatan kesehatan, mengurangi angka ketidakhadiran dan ketahanan melaksanakan tugas di tempat kerja

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat menentukan pengembangan kemampuan prestasi pemuda dibidang olah raga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan prasarana dibidang olahraga. Dengan keberadaan klub olahraga yang hingga saat ini berjumlah 906 klub dari 896 klub pada tahun 2014 atau bertambah sebesar 11 klub, Selain itu gedung olah raga juga mengalami peningkatan sebanyak 3 buah dari tahun 2014, dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 37 buah gedung dan pada tahun 2015 sebanyak 40 gedung olah raga. Jumlah lapangan olah raga tidak terjadi penambahan yakni sebanyak 298 buah. Terkait dukungan prasana keolahragaan ini, Pemerintah Daerah juga terus berupaya melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan minat generasi muda akan intensitas olahraga melalui pelaksanaan even-even olahraga yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

2.11. Pariwisata

Pariwisata dengan kegiatan utama berwisata merupakan kegiatan perjalanan untuk rekreasi. Masyarakat secara umum akan mengunjungi tempat-tempat dan atau tujuan-tujuan wisata yang dianggap memiliki daya tarik bagi wisatawan itu sendiri. Menarik dalam konteks ini sesuai dengan karakter destinasi wisatanya serta sesuai dengan minat dari wisatawan itu sendiri. mulai dari wisata gunung, pantai, perkotaan, kuliner, budaya, belanja serta lainnya.

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan pembangunan di Indonesia saat ini. Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten yang luas wilayahnya di Pulau Sumbawa, dan menyumbang salah satu icon wisata di Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai jenis potensi wisata yang masih memerlukan upaya pengembangan. Berbagai aset wisata yang saat ini ada masih memerlukan peningkatan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk berwisata serta menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi alternatif penting di masa depan.

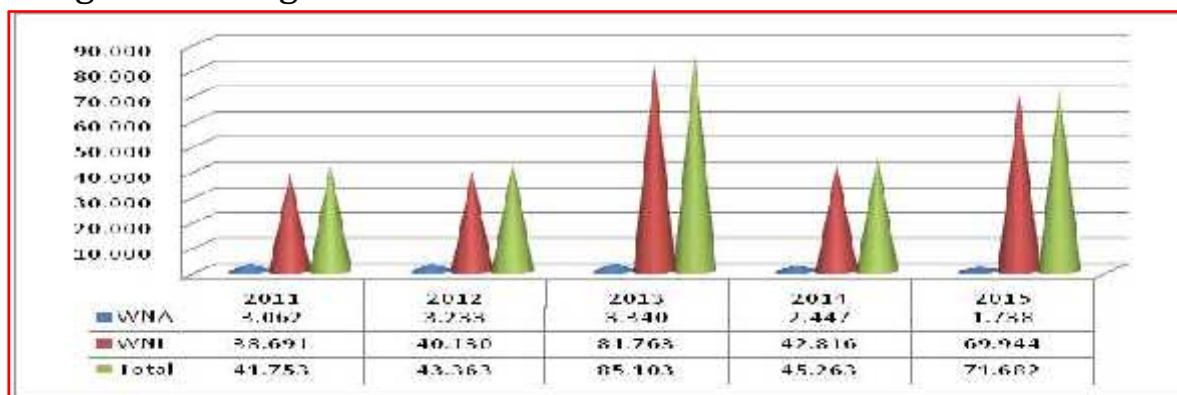
Sampai saat ini belum banyak dilakukan pembangunan obyek dan daya tarik wisata dalam memenuhi kebutuhan pariwisata di daerah ini, sehingga kontribusi pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan manusia maupun kontribusinya pada pembangunan daerah belum signifikan. Dilihat dari sisi ini, dapat dimengerti bahwa upaya pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan harapan hasil pembangunan kepariwisataan itu dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan memperpanjang lama tinggal serta kesan wisatawan terhadap aset wisata yang ada

Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Konsep pengembangan kegiatan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program

pembangunan ekonomi, fisik dan sosial sesuatu Negara, karena pengembangan pariwisata saling berkait dengan sektor lain. Pengembangan pariwisata diarahkan sedemikian rupa, sehingga dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran di bidang pariwisata dan pada tahun 2015 diselenggarakan event promosi wisata, festival dan pekan Budaya, dan pertunjukan apresiasi seni serta event wisata budaya seperti permainan rakyat rutin dilaksanakan setiap tahun. Pengembangan sarana informasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana informasi, promosi dan pemasaran produk wisata dengan menitik beratkan pada pembuatan media informasi pariwisata; pengadaan sarana pendukung promosi wisata; pengiriman duta wisata, seni dan budaya keluar daerah; Kerjasama dan pemberian bantuan untuk promosi pariwisata.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, baik berupa wisatawan lokal maupun mancanegara sampai akhir Desember 2015 terdapat sebanyak 71.682 wisatawan yang terdiri dari 69.944 wisatawan lokal dan 1.738 wisatawan mancanegara hal ini menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan sebesar 58,37% dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah kunjungan 42.816 wisatawan. Bila dilihat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2011-2015 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, akan tetapi secara total kunjungan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan rata-rata sebesar 27,92% pertahun, sebagaimana tergambar berikut ini :



Sumber : Dinas Porabudpar Kab. Sumbawa

Gambar 2.16. Kunjungan Wisatawan Tahun 2011-2015

2.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Sat.Pol-PP

a. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Keberhasilan pembangunan secara umum sangat ditentukan oleh peran sektor kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat, ketiga sektor tersebut merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan meliputi timbulnya rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat, meningkatkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat serta kondusifitas politik dalam negeri yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan stabilitas keamanan dan kenyamanan, peningkatan persatuan dan kesatuan serta pelaksanaan demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat dalam rangka untuk mencapai stabilitas, kondusifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan, memegang peranan penting terciptanya stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan, ini terlihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Adapun kegiatan yang diharapkan dapat berimplikasi pada partisipasi masyarakat, diantaranya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktek perjudian. Disamping itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keberadaan pos siskamling ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dari rentang waktu tahun 2011-2015, dengan jumlah pos siskamling pada tahun 2011 sebanyak 1.706 pos siskamling menjadi 1.837 pos siskamling pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 131 pos siskamling, sehingga dihasilkan rasio pos siskamling sebesar 11,13%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pos siskamling, maka semakin besar pula kapasitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang dalam

rangka menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan terdata sebanyak 1.837 pos siskamling, sehingga pada setiap desa/kelurahan memiliki rasio pos siskamling sebanyak 11 unit.

Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai macam konsekuensi baik yang bersifat positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat.

b. Sat.Pol-PP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal penegakan peraturan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka sarana dan prasarana yang mendukung perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan yaitu program pemeliharaan ketertiban dan pencegahan penyakit masyarakat.

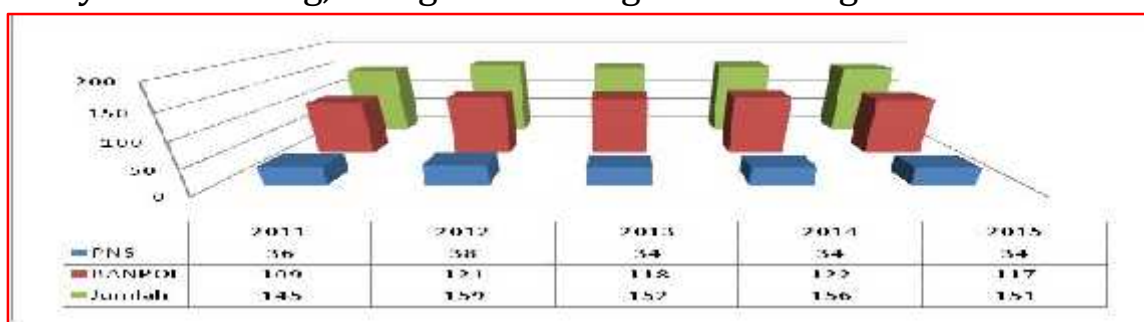
Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam hal ini adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas Satpol Pamong Praja sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati

dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Pada tahun 2015 terdapat sejumlah 70 kasus pelanggaran perda dan telah selesai penanganannya sebanyak 67 kasus, kasus pelanggaran perda terbanyak terdapat di Kecamatan Labuhan Badas sebanyak 19 kasus. Sementara terhadap pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan baik untuk kasus PKL dan Kafe terjadi 213 kasus yang terdiri dari 50 kasus kafe, 1 kasus menara tower, 90 kasus PKL, 15 kasus Pertamina, 1 kasus izin gudang dan 53 kasus Lapak.

Untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja terdapat sejumlah 151 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 34 orang dan Banpol PP sebanyak 117 orang, sebagaimana tergambar sebagai berikut :



Sumber : Sat Pol PP Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.17. Jumlah Anggota Satpol PP Tahun 2011-2015

Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, tidak mengurangi kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015.

2.13. Penanggulangan Bencana Daerah

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Secara geografis dan demografis Kabupaten Sumbawa sering mengalami bencana seperti banjir, gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, tsunami, erosi atau abrasi pantai, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, pencemaran lingkungan, konflik sosial dan wabah

penyakit. Walaupun banyak terjadi bencana, selama ini penanganannya hanya bersifat reaktif sehingga tidak efektif dan efisien. Segala aktivitas penanggulangan bencana terkesan sangat lambat sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat yang menjadi korban bencana. Selain itu alokasi dana untuk penanggulangan bencana sering tidak memadai ketika dihadapkan pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

**Tabel 2.19. Jumlah kejadian bencana
di Kabupaten Sumbawa periode 2011 s/d 2015**

No	Jenis Bencana	Tahun					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Banjir	18	40	13	13	21	105
2	Kebakaran	21	45	18	13	51	148
3	Gelombang Pasang	-	3	2	-	-	5
4	Tanah Longsor	1	3	1	1	1	7
5	Angin Putting Beliung	2	23	7	11	5	48
6	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	0
7	Kerusuhan sosial	-	-	1	-	-	1
Jumlah		42	114	42	38	78	314

Sumber : BPBD Kabupaten Sumbawa

Khusus mengenai penanganan kejadian kebakaran, Kabupaten Sumbawa memiliki Satuan armada Pemadam kebakaran. Satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah Unit Pengelola Teknis (UPT) yang dalam strukturnya dipimpin seorang Kepala Satuan dan dibantu seorang Kepala Tata Usaha untuk urusan administrasi. Berbagai potensi dan sumber daya yang telah dimiliki oleh Satuan pemadam kebakaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa sarana prasarana serta tenaga teknis yang sebagian besar telah mengikuti pelatihan teknis.

Selain ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. UPT. Satuan Pemadam Kebakaran (Satdamkar) yang berada dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa juga memiliki sarana dan prasarana tersendiri yang terpisah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa. Pemisahan tersebut disesuaikan dengan perbedaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

UPT Pemadam Kebakaran belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal, hal itu disebabkan karena keterbatasan dalam banyak hal diantaranya dalam penanganan kebakaran di Kabupaten Sumbawa

masih belum maksimal disebabkan kendaraan atau mobil pemadam kebakaran yang layak digunakan hanya ada 6 (enam) unit kendaraan dari 7 (tujuh) unit kendaraan yang ada, 1 (satu) dari kendaraan tersebut dalam keadaan rusak berat. Sedangkan jumlah kendaraan atau mobil pemadam kebakaran yang di butuhkan adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit yang nantinya akan ditempatkan pada 10 wilayah kebakaran di Kabupaten Sumbawa. Untuk penanganan bencana kebakaran di kecamatan yang jarak tempuhnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten tidak mungkin dapat dilakukan karena waktu dan jarak tempuh yang lama selain itu medan yang sulit juga mendai penghambat untuk dapat melakukan tindakan penanganan.

Bencana alam lainnya yang harus diantisipasi terutama abrasi pantai yang mulai mengancam sepanjang pemukiman penduduk yang berada dipesisir pantai, kawasan-kawasan rawan bencana tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.20. kawasan rawan bencana di Kabupaten Sumbawa

Jenis Bencana	Kawasan Rawan Bencana
Rawan Tanah Longsor Tipe A	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Rawan Tanah Longsor Tipe B	Jalur jalan Orong Telu-Ropang-Lunyuk-Jalur ke Sumbawa Barat dan pada desadesa di Kecamatan Batu Lanteh
Kawasan Rawan banjir	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kawasan Rawan <i>Tsunami</i>	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kawasan Rawan Angin Topan	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kebakaran	Kota Sumbawa, Kota Kec. Utan, Alas, Lape, Plampang, Empang, Tarano

Sumber : BPBD Kabupaten Sumbawa

2.14. Pemerintahan Umum

Dalam urusan ini, terdapat beberapa SKPD yang termasuk dalam kategori sektor ini, antara lain SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, pencapaian target-target kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya juga memiliki beberapa kebijakan, antara lain langkah strategis dan politis yang diperlukan mendukung strategi,

yang harus sejalan dengan kebijakan daerah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian yang akan ditempuh antara lain; Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; Peningkatan disiplin; Pengembangan aparatur; Penerapan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan Penggunaan system informasi manajemen pegawai serta Pemberian penghargaan. Dalam birokrasi Pemerintahan, dikenal jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten sebagai pilot project reformasi birokrasi di daerah yang ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Rincian Golongan dan Eselon Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah PNS	%
1	I	96	3	99	1,19
2	II	1.303	875	2.178	26,15
3	III	1.971	1.949	3.920	47,07
4	IV	1.265	891	2.156	25,59
	Jumlah	4.610	3.718	8.328	100
	Tahun 2014	4.451	3.389	7.840	100
	Tahun 2013	4.587	3.455	8.042	100
	Tahun 2012	4.704	3.492	8.196	100
	Tahun 2011	4.854	3.539	8.393	100
No	Eselon	Pria	Wanita	Jumlah PNS	%
1	I	0	0	0	0
2	II	31	1	32	3,44
3	III	163	20	183	19,7
4	IV	489	225	714	76,86
	Jumlah Pejabat Struktural	683	246	929	11,16
	Tahun 2014	670	242	912	11,63
	Tahun 2013	668	241	909	11,3
	Tahun 2012	669	230	899	10,97
	Tahun 2011	670	204	874	10,41
	Jumlah Pejabat Fungsional	3.927	3.472	7.399	88,84
	Tahun 2014	2.297	2.471	4.768	60,82
	Tahun 2013	3.919	3.214	7.133	88,7
	Tahun 2012	4.035	3.262	7.297	89,03
	Tahun 2011	4.184	3.335	7.519	89,59

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa

Pada tahun 2015 jumlah PNS mengalami peningkatan sejumlah 488 pegawai dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 7.840 pegawai pada tahun 2014 menjadi 8.328 pegawai pada tahun 2015, Berdasarkan proporsinya, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 masih didominasi oleh golongan III dengan proporsi sebesar 47,07%, diikuti oleh golongan II sebesar 26,15%, kemudian golongan IV sebesar 25,59% dan golongan I sebesar 1,19%. Besarnya proporsi golongan III ini terjadi antara lain karena adanya peningkatan strata PNS, hal ini terlihat dari proporsi rata-rata pertumbuhan pertahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat bahwa PNS golongan III dan IV menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 2,49% dan 2,74%, sementara untuk PNS golongan I dan II mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 6,40% dan 5,08%. Berdasarkan eselon PNS, lebih didominasi oleh Eselon IV dengan proporsi sebesar 76,86%, diikuti oleh eselon III sebesar 19,70% dan eselon II sebesar 3,44%.

Untuk tingkat pendidikan PNS masih didominasi oleh PNS yang berpendidikan Diploma IV / Strata I dengan proporsi sebesar 41,33%, diikuti oleh PNS yang berpendidikan SMA / sederajat sebesar 30,44%, D-II sebesar 12,01%, dan D-III sebesar 10,85%. Sementara untuk PNS yang berpendidikan S-2 dan S-3 proporsinya masih sangat rendah masing-masing sebesar 2,02% dan 0,02%, akan tetapi dalam rentang waktu tahun 2011-2015 terjadi peningkatan tingkat pendidikan PNS rata-rata pertahun dari Jenjang Diploma DIII, DIV/S1, S2 dan S3 masing-masing sebesar 1,31%, 6,03%, 16,96% dan 25,74%, sementara dari jenjang SD sampai DII mengalami penurunan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 4,47%, 16,33%, 1,56%, 13,36% dan 8,60%. Adapun gambarannya seperti pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.22. PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan 2015

No	Pendidikan	2014	%	2015	%
1	SD / Sederajat	66	0,84	66	0,79
2	SMP / Sederajat	113	1,44	110	1,32
3	SMA / Sederajat	2.245	28,64	2.535	30,44
4	D – I	115	1,47	101	1,21
5	D – II	1.105	14,09	1.000	12,01
6	D – III	892	11,38	904	10,85
7	D - IV / S-1	3.148	40,15	3.442	41,33
8	S – 2	154	1,96	168	2,02
9	S – 3	2	0,03	2	0,02
Jumlah		7.840	100	8.328	100

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa

Berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur pada tahun 2015 terdapat 29 kasus yang telah diselesaikan melalui penerbitan SK Bupati, sementara 32 kasus lainnya sedang dalam proses penyelesaian, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Tabel 2.23. Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2014

No.	Uraian Penanganan Kasus	Jumlah
1.	Kasus yang telah diselesaikan (terbit SK. Bupati)	29
2.	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian	20
3.	Kasus yang masih dalam proses pembinaan	32
Jumlah		81

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa

2.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada beberapa sasaran di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, sehingga keberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan, karena masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian.

Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Kecamatan secara partisipatif, maka pada awal tahun 2015 telah dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan seperti pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan antara lain berupa

fasilitasi Pokjanal Posyandu dengan Tim yang terdiri dari SKPD terkait sesuai peran dan fungsinya. Pokjanal Posyandu yang diberdayakan adalah meliputi pokjanal posyandu seluruh desa se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 157 desa, Pokjanal Kelurahan sebanyak 8 kelurahan, Pokjanal Kecamatan sebanyak 24 kecamatan serta ditambah Pokjanal dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 pokjanal.

Selain pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, kegiatan – kegiatan lainnya yang dilaksanakan diantaranya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini dilatarbelakangi tingginya angka mortalitas balita serta masih rendahnya penyelesaian pendidikan dasar menengah pertama dalam rumah tangga miskin. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita serta anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin dan rumah tangga sangat miskin.

Disamping itu implementasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM-MPd masih dilaksanakan pada 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Utan, Lape, Plampang, Labuhan Badas, Lunyuk, Alas Barat, Empang, Labangka, Orong Telu, Lenangguar, Lantung dan Kecamatan Lopok. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat diantaranya yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia yang bersifat partisipatif dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, sehingga masyarakat termotivasi menjadi kreatif, inovatif dan memiliki kecerdasan like skill. Pemberdayaan tersebut berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan prinsip teknis dapat dipertanggungjawabkan, secara ekonomis memberikan keuntungan dan secara sosiologis tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pembentukan dan Pembinaan Desa Model, dengan pembinaan terdiri dari beberapa bidang yang disesuaikan dengan aktifitas pembangunan yaitu meliputi ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Penetapan desa model dilaksanakan melalui lomba desa yang terintegrasi, indikator penentuan desa model tersebut juga

menggambarkan luasnya pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya peningkatan derajat kemajuan dan perkembangan desa yang ditandai dengan lahir dan dibinanya Desa Model Bunga Eja Kecamatan Empang.

Untuk kelompok binaan LPM di Kabupaten Sumbawa terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan sebanyak 115 kelompok atau tumbuh sebesar 479,17% dari tahun sebelumnya, yakni dari 24 kelompok pada tahun 2014 menjadi 139 kelompok pada tahun 2015.

BAB 3

Penutup

Buku " Data Base " Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 dimaksudkan untuk dijadikan sebagai arah dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Sumbawa sekaligus dijadikan patokan target pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumbawa.

Visi dan misi Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjadi bagian tanggung jawab sebagian pihak saja. Pembangunan Bidang Sosial Budaya hanya menjadi salah satu unsur dalam rangkaian komponen pendukung untuk tercapainya visi dan misi tersebut, untuk mencapai tujuan yang diharapkan semua bidang dalam pembangunan daerah ini harus bersinergi secara optimal melalui perencanaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah, karena terkait dnegan persoalan filsafat hidup bangsa, pandangan hidup masyarakat, persepsi, cara berfikir, sistem nilai dan orientasi pada masyarakat. Sasaran dari pembangunan bidang sosial budaya adalah membangun negara bangsa sehingga menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan kumpulan masyarakat yang berbagai latar belakang tentunya akan menghasilkan permasalahan yang beragam pula. Akan tetapi keberagaman tersebut itu juga yang dapat menjadi potensi yang luar biasa sebagai modal dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Masyarakat kabupaten sumbawa diharapkan melalui pelaksanaan tugas pemerintah dalam berbagai hal baik fungsi pemerintahan, pelayanan maupun pembangunan diharapkan mampu menciptakan masyarakat sumbawa yang berdaya saing dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga akan dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat lain di daerah lain.

Pada sektor pendidikan yang memiliki korelasi kuat terhadap sektor pembangunan lainnya. Diharapkan adanya peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dapat dienyam oleh masyarakat sehingga diharapkan tidak hanya dapat menaikkan IPM Kabupaten Sumbawa tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan, hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Perlu dilakukan perubahan yang lebih mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi, serta lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat pada saat ini melalui peningkatan kualitas pendidik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.

Pendidikan bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berupa negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal meliputi berbagai kursus atau pelatihan keterampilan seperti mekanik, otomotif, listrik bangunan, kerajinan dan tata niaga.

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan fisik sekolah. Jumlah unit sekolah berdasarkan tingkat pendidikan. Keadaan lembaga pendidikan, siswa dan guru pada setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Sumbawa menjadi indikator tentang kondisi umum infrastruktur pendidikan untuk aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan memperhatikan indikator-indikator seperti rasio siswa per ruangan, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, rasio guru per siswa. Indikator ini menjadi ukuran daya tampung dan efektivitas proses belajar-mengajar.

Pada Sektor kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak hanya diupayakan oleh jajaran aparatur atau tenaga kesehatan saja, melainkan sangat ditunjang oleh adanya peran aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi objek dan sebagai subjek pembangunan kesehatan. Upaya-

upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan masyarakat termasuk swasta perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga diperoleh sinergisme dalam upaya pembangunan kesehatan di daerah.

Dalam proses pengelolaan dan pendataan arsip-arsip bagian urusan kearsipan telah melakukan proses pengelolaan arsip secara maksimal, meskipun target yang dicapai belum maksimal hal itu dikarena jumlah tenaga kearsipan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah arsip yang tidak sedikit dan memerlukan proses yang sangat panjang, rumit dan harus dengan penuh ketelitian khusus dalam pengurusannya.

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal tersebut terlihat dengan bertambahnya jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah perpustakaan juga dibarengi dengan meningkatnya minat baca masyarakat hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan umum dan juga perpustakaan keliling.

Untuk urusan kependudukan Perkembangan populasi penduduk di suatu daerah akan memberikan gambaran tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang mendiami daerah itu terhadap tahun sebelumnya. Populasi penduduk akan bertambah bila jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari daerah lain lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk ke daerah lainnya.

Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah mengenai kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah yang telah dikeluarkan. Selain KTP, ketertiban administrasi kependudukan juga dapat dilihat dari akta kependudukan yang telah dikeluarkan dan dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Sumbawa. Data tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Sumbawa. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, hal itupun proporsinya masih belum 100 %. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi.

Pembangunan keluarga ditujukan untuk meningkatkan derajat kualitas individu melalui pendekatan berbasis keluarga. Pendekatan pembangunannya adalah meningkatkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera menuju terwujudnya nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sehingga mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Pendekatan ini berupaya menggeser peran penduduk dalam pembangunan dari semula sebatas obyek menjadi subyek pembangunan. Dengan konsep tersebut maka kualitas penduduk akan menentukan seberapa besar proporsi penduduk yang tetap hanya sebatas obyek dan seberapa besar yang dapat berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka upaya yang dilakukan secara generik adalah melakukan perencanaan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pada saat bersamaan meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan sehingga secara simultan akan mengurangi beban tanggungan jiwa dan pada saat bersamaan produktifitas penduduk dapat meningkat. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana menjadi salah satu tolok ukur pembangunan daerah dan nasional.

Jumlah dan sebaran penduduk merupakan salah satu variabel dalam pengambilan keputusan investasi publik. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk berjumlah sedikit dan tersebar pada satuan wilayah geografis yang luas akan membutuhkan biaya investasi per satuan yang lebih tinggi dibanding wilayah berpenduduk banyak dan tidak tersebar terlalu jauh. Informasi jumlah dan sebaran akan memberi dampak yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan pembangunan wilayah secara luas.

Dalam sektor pembangunan sosial penanganan sekaligus pemberdayaan fakir miskin juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengurangi jumlah penyakit-penyakit sosial ditengah masyarakat. Termasuk juga pemberdayaan masyarakat atau komunitas adat terpencil. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk usaha

ekonomi, pemberian pelatihan keterampilan bagi khusus penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena tingginya jumlah angkatan kerja di suatu daerah harusnya menjadi modal dasar untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Bila terjadi sebaliknya maka berpeluang besar untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Kebijakan dan program transmigrasi dilaksanakan dalam kerangka memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia. Melalui model Kerjasama Antar Daerah paradigma baru pembangunan transmigrasi di era Otonomi Daerah diharapkan merupakan penyempurnaan dari konsep penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya. Penyelenggaranya tetap berada ditangan Pemerintah, dengan mulai mengundang unsur-unsur swasta dan menata model penyelenggaraan transmigrasi melalui pola kerjasama antar daerah, yaitu Provinsi / Kabupaten / Kota pengirim transmigran dengan Propinsi / Kabupaten / Kota penerima / penempatan transmigran.

Kepariwisata adalah keseluruhan usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani wisatawan. Karena pariwisata sebagai tuntutan kebutuhan manusia yang wajar mempunyai lingkup pengaruh yang menyeluruh, maka pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan berencana secara menyeluruh, sehingga dapat di peroleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik segi ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu progam pembangunan ekonomi, fisik dan sosial. Disamping itu perencanaan harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten yang luas wilayahnya di pulau sumbawa dan menyumbang salah satu icon pariwisata di

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai jenis potensi wisata yang memerlukan upaya pengembangan. Pengembangan potensi wisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengelolaan yang menerapkan konsep ekoturisme. Saat ini sektor pariwisata di Kabupaten Sumbawa bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan peran kepariwisataan sangat terkait antara barang berupa obyek wisata yang dapat dijual dengan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dalam industri pariwisata.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan bencana di daerah ditandai dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Unit kerja ini memiliki UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang khusus menangani masalah kebakaran yaitu satuan Pemadam Kebakaran. Sebagai unit kerja baru, maka penyediaan personil yang memenuhi kualifikasi menjadi tugas berat institusi pengelola kepegawaian di daerah kita ini. Keberadaan unit ini secara langsung direncanakan serta diharapkan dapat menjadi penuntas terhadap berbagai persoalan yang menimpa masyarakat kaitan dengan adanya bencana.

Peningkatan Sumberdaya manusia dalam hal ini apartur pemerintahan mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah dalam setiap fungsinya. Selain aparatur, peneydiaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi hal wajib. Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, BKPP Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait masalah apatur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap masing-masing kualifikasi pekerjaan. Program yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas melalui pengiriman PNS Tugas belajar, baik Diploma, Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3. Sedangkan bagi Aparatur yang akan menempati eselon tertentu juga di bekali dengan diikutsertakan dalam DiklatPim baik tingkat II, III dan IV.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2015 yang telah dituangkan dalam Buku Data Base Data dan Fakta Pembangunan

Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 ini diharapkan dapat untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Sangat disadari, bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Dengan terciptanya masyarakat sumbawa dalam kondisi ideal tentunya akan dapat pula menjadikan kabupaten sumbawa dalam situasi yang ideal pula. Peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan potensi dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kearifan lokal akan terwujud.

Sejalan dengan hal tersebut maka konsistensi SKPD dalam merumuskan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan tujuan jangka panjang pembangunan di daerah kita. Pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya ini sebagaimana bidang-bidang lain harus dibarengi pula oleh pembangunan serta penciptaan ide-ide serta kreatifitas para pelaku pembangunan.